

TESIS

**ANALISIS KINERJA
PENYULUH PERTANIAN
DI KABUPATEN TANA TORAJA**

**AN ANALYSIS OF AGRICULTURAL INFORMATION
DISSEMINATOR'S PERFORMANCE
IN TANA TORAJA REGENCY**

SUDIRMAN



**PROGRAM PASACASARJANA
UNIVERESITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

**ANALISIS KINERJA PENYULUH PERTANIAN
DI KABUPATEN TANA TORAJA**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Sistem- Sistem Pertanian

disusun dan diajukan oleh

SUDIRMAN

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2007

**ANALISIS KINERJA PENYULUH PERTANIAN
DI KABUPATEN TANA TORAJA**

Disusun dan diajukan oleh

SUDIRMAN

Nomor pokok P0108204509

Telah di pertahankan di depan Panitia ujian Tesis

Pada Tanggal 10 Maret 2007

Dan Dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat

Prof. DR.Ir.H.M.Syawal S.MSc

DR. Ir.Darmawan Salman. MS

Ketua Program Studi
Sistem-sistem Pertanian

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof DR.Ir.Abd.Latief Toleng,MSc Prof. DR. dr. Abdul Razak Thaha, MSc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sudirman
No Mahasiswa : P 0108204509
Program Studi : Sistem-Sistem Pertanian

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Tana Toraja, Maret 2007

Sudirman

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas seslesainya tesis ini.

Pemikiran yang melatari pokok permasalahannya muncul dari pengamatan penulis terhadap aktivitas penyuluh pertanian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Tana Toraja, yang seolah-olah telah kehilangan arah, akibat dari bentuk kelembagaannya yang tidak mencakup keseluruhan ruang lingkup sektor pertanian sehingga pada gilirannya terjadi pencitraan penurunan kinerja penyuluh di mata masyarakat Tana Toraja

Penulis bermaksud, menyumbangkan beberapa konsep pemikiran guna memperbaiki kinerja penyuluh pertanian tersebut agar dapat memperlihatkan peran yang nyata dalam pembangunan pertanian di Tana Toraja.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis, selama masa penyusunan tesis ini, yang hanya berkat rahmat Allah melalui bantuan berbagai pihak, maka tesis ini dapat rampung sebagaimana adanya. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. H. M. Syawal S, MSc. Sebagai Ketua Komisi Penasihat dan Dr.Ir.Darmawan Salman, MS. Sebagai anggota Komisi Penasihat atas bantuan dan bimbingan yang diberikan mulai dari pengembangan minat terhadap permasalahan penelitian sampai dengan

penulisan tesis ini. Terima kasih juga, penulis sampaikan kepada para dosen pengajar pascasarjana yan telah mengalihkan pengetahuan yang dimiliki kepada penulis selama proses belajar berlangsung. Selanjutnya saya mengucapkan pula terima kasih yang tak terhingga kepada bapak J.A.Situru' SH. Selaku Bupati Tana Toraja yang telah memberi kesempatan kepada penulis dalam bentuk izin belajar pada program Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Hal yang sama saya sampaikan pula kepada Ir. Petrus Nari Toding selaku Asisten Administrasi Pembangunan Kabupaten Tana Toraja, yang telah banyak memberi dorongan untuk menjalani proses belajar ini, serta teristimewa rekan - rekan penyuluh pertanian yang telah menjadi obyek penelitian sebagai responden dan para kontak tani/ petani yang menjadi informan. Mudahah - mudahah semua kebaikan yang mereka berikan akan menjadi amal jariah dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin

Tana Toraja, Maret 2007

Sudirman

ABSTRAK

SUDIRMAN, *Analisis Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Tana Toraja* (Dibimbing Oleh. H.M.Syawal S dan Darmawan Salman)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keragaan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten Tana Toraja, dan mengetahui besarnya kontribusi faktor-faktor kelembagaan penyuluh pertanian terhadap kinerja penyuluh di kabupaten Tana Toraja

Penelitian ini dilaksanakan pada wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Tana Toraja. Sampel dipilih secara purposif dan acak 30 penyuluh pertanian sebagai responden dan 30 petani/ kontak tani sebagai informan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner dan studi pustaka. Data dianalisis dengan statistik linier berganda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel organisasi (x1) diperoleh sebesar 39,59 %, variabel SDA (x2) sebesar 58,91 %, variabel aturan dan prosedur kerja (x3) sebesar 61,22 %, dan variabel kinerja (Y) sebesar 59,90 %. Dengan demikian aspek organisasi penyuluh masih perlu ditingkatkan. Adapun kontribusi paduan kegiatan variabel organisasi terhadap kinerja penyuluhan pertanian sebesar 12,6 %; kontribusi variabel sumberdaya terhadap kinerja penyuluhan pertanian mengalami penurunan sebesar 10,9 %. dan kontribusi paduan kegiatan variabel aturan dan prosedur kerja sebesar 72,7 %, Selanjutnya bila dilihat hubungan antara variabel kinerja (Y) dengan variabel x1, x2, x3 secara bersama-sama memperlihatkan angka sebesar $R=0,766$, sedangkan koefisien determinasi R^2 memperlihatkan angka sebesar 0,58,7 ini berarti perubahan variabel (Y) disebabkan oleh variabel x1, x2, x3 secara bersama-sama sebesar 58,7 % sehingga sisanya sebesar 42,3 % disebabkan oleh faktor lain

ABSTRACT

SUDIRMAN. *An Analysis of Agricultural Information Disseminator's Performance in Tana Toraja Regency* (Supervised by **H.M.Syawal S.** and **Darmawan Salman**)

The study are devoted to describing the structure of the agricultural information disseminating agencies in Tana Toraja Regency and investigating the contribution of the institutional factors of the agency to the performance of the disseminator in the regency

The study is conducted to 15 different working areas covered by the agencies spread all over Tana Toraja Regency. The study is based on a survey conducted to sample of 30 farmers and interviews to a 30 agricultural information disseminator's.

The descriptive analysis indicates hat the respondetn's perception on organization variable (X1) is an average of 39.59%, which based on a 5-point raitng scale, is insufficient. On natural resources (x2), their perception is 58.91%, which is sufficient. Rules and work procedure variable (x3) is 61.22% which is more sufficient, and the performance variable (Y) is 59.90% (sufficient). The result signify that the structure of the agency in Tana Toraja needs to be improved particularly on the instructor/ information disseminator organization. The result of regression test analysis concludes the contribution of combined activities of organization variable on agricultural information dissemination activities is 12.6%. This Implies that the organization, which houses the instructors, deserves more attention. The contribution of the resources variable on the information dissemination activities decreases to 10.9%. The contribution of variable of rules and work procedure is 72.7%. This proves that the rules and procedure are well implemented by the instructors.

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSRTACK</i>	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pembangunan Pertanian	11
B. Kinerja	15
C. Penyuluhan	17
D. Kerangka Pikir	22
E. Hipotesis	27
F. Batasan Pengetian	27

BAB III	METODE PENELITIAN	31
	A. Tempat dan Waktu	31
	B. Tipe dan Dasar Penelitian	31
	C. Populasi Sampel	31
	D. Jenis dan Sumber Data	32
	E. Metode Pengumpulan Data	33
	F. Analisis Data	34
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	37
	A. Lokasi Penelitian	37
	B. Identitas Penyuluh	41
	C. Deskripsi Rumusan Kelembagaan	43
	D. Hasil Analisis Berdasarkan Uji Regresi	83
BAB V	PENUTUP	86
	A. Kesimpulan	86
	B. Identitas Penyuluh	88
	DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Pembagian Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Di Kabupaten Tana Toraja	39
2.	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Organisasi (X1)	45
3.	Tanggapan Responden Terhadap Variabel SDA (X2)	67
4.	Alokasi Anggaran Penyuluhan Tahun 2001 – 2006	69
5.	Perbandingan Anggaran Penyuluhan dengan Alokasi Anggaran Penyuluhan yang langsung dibutuhkan petani berupa untuk Media /Metode Penyuluhan dan Pelatihan/Kursus Tani.	70
6.	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Aturan dan Prosedur Kerja (X3)	77
7.	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja Penyuluh (Y)	82

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1.	Gambaran Kerangka Fikir Penelitian	26
2.	Bagan Sruktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2000	47
3	Bagan Sruktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2000	50
4	Pilihan Bagan Sruktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Tana Toraja dengan Memempatkan BPP sebagai Kantor Cabang Dinas	53
5	Pilihan Bagan Sruktur Organisasi Dengan Penambahan Sub Dinas Penyuluhan	55
6	Pilihan Bagan Sruktur Organisasi Dengan Penambahan Sub Dinas Hortikultura dan Sub Dinas Perkebunan	57
7	Pilihan Bagan Sruktur Organisasi Badan/Kantor Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Badan Ketahanan Pangan	60
8	Pilihan Bagan Sruktur Organisasi Badan/Kantor Penyuluhan Pertanian, Kehutanan	63

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman
1.	Daftar Kuesioner	90
2.	Daftar Nama-nama Responden	95
3	Daftar Nama-nama Informan	96
4	Tabulasi Data Berdasarkan masing-masing Variabel	97
5	Rekapitulasi Tabulasi Data	98
6	Hasil Pengolahan Data Uji Regresi Dengan Menggunakan Program SPSS 12	99
7	Koefisien Taksiran Kontribusi Organisasi, Sumberdaya, serta Aturan dan Prosedur kerja (x) Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian (Y)	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era tahun 1970-an muncul sebuah inovasi baru dalam pertanian khususnya di Negara-negara berkembang termasuk di Indonesia yang dikenal dengan revolusi hijau. Konsep utamanya adalah mengintroduksi intensifikasi pertanian yang melibatkan penyuluh pertanian, dan tidak dipungkiri, hasilnya sangat spektakuler karena dalam waktu singkat bisa meningkatkan produktivitas lahan pertanian setidaknya peningkatan produktivitas padi persatuan luas yang meningkat dengan tajam. Hal tersebut ditandai dengan berhasilnya Indonesia swasembada beras pada tahun 1984 yang sebelumnya merupakan negara pengimpor beras yang sangat besar.

Akan tetapi, keberhasilan itu tidak bertahan lama karena revolusi hijau tersebut ternyata hanya bersifat *hardware* saja, tidak menyentuh aspek *software* nya. Revolusi hijau hanya menyentuh teknologi pertanian, namun tidak banyak menyentuh teknologi pengelolaan pertanian atau manajemennya.

Salah satu penemuan manusia paling besar di abad ke-20 adalah manajemen yang mengajari manusia tentang bagaimana mengelola organisasi dengan lebih efisien dan memberikan nilai tambah, namun penemuan tersebut belum dilekatkan dalam revolusi hijau, sehingga yang terjadi adalah membangun ketergantungan petani kepada produsen

pertanian modern, tanpa menjadikan mereka petani-petani modern yang efisien.

Untuk menjadikan sektor pertanian kompetitif, maka yang pertama dijadikan acuan adalah melihatnya bukan sebagai industri rumah tangga, namun sebagai industri modern yang diartikan sebagai organisasi bisnis yang harus menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari planning, organizing, leading dan controlling (Sumodiningrat,2000).

Fungsi-fungsi manajemen tersebut, selanjutnya hanya akan bermanfaat bila dikelola oleh manusia yang mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Lebih lanjut dikemukakan bahwa informasi yang digulirkan sekarang perlu dimulai dari pembenahan perilaku semua kalangan terutama pada segenap jajaran aparat negara dan petugas pertanian secara keseluruhan agar berpihak pada pemberdayaan masyarakat khususnya petani, selain itu peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian merupakan agenda yang cukup mendesak mengingat bahwa sektor pertanian diharapkan dapat bangkit lebih dahulu daripada sektor-sektor lainnya.

Hasil evaluasi studi Bank Dunia dalam Sumodiningrat (2000), menyebutkan bahwa :1). Peran serta petani dalam perencanaan penyuluhan pertanian sangat diperlukan, 2). Penyelenggaraan penyuluhan harus dibedakan berdasarkan spesifik lokalita, 3). Pendekatan "Top down" serta sistem penyampaian informasi penyuluhan yang lebih bersifat desentralisasi, 4). Pelayanan penyuluhan pertanian yang rumit

memerlukan waktu dalam pengembangannya, 5). Biaya penyuluhan pertanian adalah sangat penting dan dianjurkan, 6). Mata rantai riset yang cocok dengan penyuluhan serta keterlibatan petani harus diarahkan pada sistem usahatani.

Dari hasil studi tersebut diketahui beberapa titik kelemahan dalam sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Indonesia, sehingga menyebabkan kerugian dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi pertanian, kelemahan tersebut antara lain :

- 1) Peran serta petani yang sangat kecil dan focus penyuluhan salah tempat,
- 2) Kelembagaan di tingkat petani tidak berfungsi dan tidak efektif,
- 3) Metode yang digunakan umumnya kadaluarsa dari biasanya, hanya menekankan alur perintah dari atas kebawah,
- 4) Pengkotakan dalam penyelenggaraan penyuluhan sehingga tampak kurangnya koordinasi antar sub sektor,
- 5) Struktur dan manajemen penyuluhan pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) lemah dan tidak memadai,
- 6) Kemampuan teknis para penyuluh yang sangat terbatas dan karier para penyuluh masih tidak jelas arahnya ,
- 7) Teknis penyuluhan lemah,
- 8) Dukungan dana terhadap penyuluhan sangat kecil,
- 9) Koordinasi kebijaksanaan penyuluhan pertanian kurang jelas , dan
- 10) Kecilnya keterlibatan peran wanita tani dalam penyuluhan pertanian.

Faktor penyebab lemahnya sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian tersebut pada dasarnya disebabkan oleh bentuk kelembagaan

penyuluhan yang sering berubah-ubah dan beragam mulai dari tingkat pusat, sampai ke daerah.

Perubahan bentuk kelembagaan penyuluhan tersebut dikemukakan sebagai berikut: Pada awal Pelita pertama terbit Keputusan Presiden No 95 Tahun 1969 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Bimas, sebagai lembaga yang mewadahi penyuluh pertanian, ketika itu pemerintah mengangkat penyuluh pertanian secara besar-besaran sebagai konsekuensi dari program Bimas itu sendiri, pada masa tersebut pola pelaksanaan kegiatan penyuluhan baru dalam taraf mencari bentuk.

Pada Tahun 1976 terbit keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 223/Kpts/Um/1976 dan No 76 Tahun 1976 tentang pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang bertugas menyelenggarakan program dan melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian terhadap petani menuju cara bertani yang baik, usahatani yang lebih menguntungkan dan hidup sejahtera, pada periode tersebut wujud penyuluhan pertanian sudah mulai nyata, walaupun kegiatan utamanya masih terfokus pada peningkatan produksi beras hal ini ditandai dengan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada Tahun 1984.

Selanjutnya pada Tahun 1985, penyelenggaraan penyuluhan berubah lagi dengan terbitnya Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No 59 Tahun 1986 / No 695/Kpts/LP.120/II/1986 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Pada keputusan ini Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BPP yang menjadi wadah organisasi penyuluh pertanian dilimpahkan ke Daerah Tingkat II yang dipimpin oleh seorang kepala BPP yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/walikota, dengan bantuan Sekretaris Pelaksana Harian Bimas, Kepala BPP tersebut dibantu oleh kelompok penyuluh pertanian sebanyak lima orang yang masing-masing membidangi bidang sumberdaya pertanian, tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan dan perikanan, sementara ditingkat wilayah kerja penyuluhan pertanian (WKPP) ditempatkan seorang penyuluh pertanian lapangan yang bertanggung jawab kepada kepala BPP. Pada masa tersebut, penyuluh pertanian dapat diakui sebagai jabatan fungsional, hal ini ditandai dengan diterbitkannya SK MENPAN No. 73 tahun 1985 yang diikuti dengan Surat Edaran Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BAKN No 17/Kpts/L.P.410/1/1986/ No 01/SE/1986 yang mengatur tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian.

Selanjutnya pada tahun 1991 terbit keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 1991/ Nomor 539/Kpts/LP.120/7/91 tentang pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang antara lain menetapkan bahwa Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah unit penunjang dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II yang pembinaannya dilakukan oleh Dinas Daerah Tingkat II lingkup pertanian dalam rangka menunjang kegiatan penyuluhan pertanian, selain itu berfungsi pula sebagai satuan administrasi pangkal

bagi penyuluh pertanian yang berstatus pegawai negeri sipil pusat yang diperbantukan.

Pada masa itu pula BPP diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan dikelola oleh Dinas Daerah Tingkat II lingkup pertanian yang membidangi komoditas pertanian yang dominan diwilayah kedudukan BPP, dalam bentuk Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian (FKPP II)

Kemudian pada Tahun 1996 terbit Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian nomor 54 Tahun 1996/ nomor 301/Kpts/LP.120/4/96 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Dalam keputusan tersebut mengatur tentang pembentukan Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) yang merupakan unit kerja organik penyuluhan pertanian yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II. Hubungan kerja antara BIPP dan Dinas-Dinas tingkat II lingkup pertanian adalah hubungan koordinatif, sedangkan pembinaan taktis operasional terhadap BIPP dilakukan oleh Bupati/ Walikota yang sehari-harinya dilakukan oleh Asisten II Sekwilda Tingkat II. Pada masa tersebut biaya penyelenggaraan penyuluhan pertanian masih menjadi wewenang dan tanggung jawab pusat.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang disusul dengan diterbitkannya Perda No. 16 Tahun 2000 tentang kelembagaan pemerintahan Kabupaten Tana Toraja, BIPP yang menjadi lembaga penyuluhan pertanian berubah dan

hanya melekat pada Dinas Pertanian dan Pangan sebagai kelompok fungsional, padahal fungsi penyuluhan pertanian yang diemban penyuluh meliputi keseluruhan ruang lingkup sektor pertanian, perkebunan, peternakan termasuk perikanan, sementara disisi lain lembaga Dinas Pertanian dan Pangan hanya mencakup sub sektor tanaman pangan, peternakan, dan perikanan, sedangkan sub sektor hortikultura dan subsektor perkebunan melekat pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Oleh karena itu penyuluh secara institusi hanya melaksanakan fungsi penyuluhan pertanian yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Pangan sedangkan yang berkaitan dengan komoditas hortikultura dan perkebunan terabaikan. Sejak saat itulah penyelenggaraan penyuluhan kurang diperhatikan, betapa tidak, biaya penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang selama ini masih ditanggung pusat dilimpahkan ke daerah, sebagai konsekuensi dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan . Akan tetapi sangat disayangkan karena biaya penyelenggaraan penyuluhan pertanian terabaikan, atau kurang mendapat perhatian dalam anggaran APBD II akibatnya kinerja penyuluh kelihatannya menurun.

Indikasi penurunan kinerja penyuluh pertanian di Tana Toraja dapat dilihat dari lemahnya dampak penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian yang meliputi 1) Pembinaan petani; 2) Penerapan teknologi pertanian ditingkat petani; 3) Produktivitas komoditas pertanian yang dihasilkan petani; 4) Hubungan kerjasama petani dan kelompok tani.

Selanjutnya indikasi lain yang memperlihatkan penurunan kinerja penyuluh adalah banyaknya keluhan-keluhan masyarakat atau petani, maupun lembaga legislatif serta lembaga-lembaga masyarakat lainnya yang sering mempertanyakan keberadaan penyuluh pertanian.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, kemudian menimbulkan pertanyaan yang saling bertentangan satu sama lain. Apakah kinerja penyuluh menurun karena kelembagaannya atau segala fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak terpenuhi, ataukah sebaliknya apakah kelembagaannya atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak dipenuhi oleh Pemda Kabupaten Tana Toraja, karena penyuluh selama ini dianggap tidak memperlihatkan peran yang nyata

Akibat dari kondisi riil yang ada di kabupaten Tana Toraja tersebut, maka hal yang perlu dan mendesak untuk dilaksanakan agar dapat keluar dari polemik tersebut adalah melakukan suatu upaya atau strategi yang dapat memperbaiki kinerja penyuluh pertanian yang pada gilirannya akan memberdayakan petani dengan mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan ruang lingkup kelembagaan penyuluhan pertanian yang terdiri dari aspek organisasi, sumberdaya dan aturan/prosedur kerja yang diduga memengaruhi kinerja penyuluh dengan berpedoman pada hasil-hasil penelitian sebelumnya dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan menerapkan fungsi manajemen secara baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana keragaan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Tana Toraja
2. Seberapa besar kontribusi faktor-faktor kelembagaan penyuluhan terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Tana Toraja

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan keragaan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Tana Toraja;
2. Mengetahui besarnya faktor-faktor kelembagaan penyuluhan yang terdiri dari organisasi, Sumber daya, serta aturan dan prosedur kerja memberikan kontribusi terhadap kinerja penyuluh penyuluh pertanian di kabupaten Tana Toraja

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan referensi dan rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Tana Toraja terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian
2. Sebagai bahan informasi bagi pelaku kegiatan penyuluhan khususnya bagi penyuluh dan petani di Kabupaten Tana Toraja

3. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan pertanian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian tidak akan bisa berjalan lancar kalau tidak didukung oleh sistem penyuluhan pertanian yang baik. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya, dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (Undang-Undang Republik Indonesia Tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan No. 16 Tahun 2006)

Mosher (1987), menyatakan bahwa ada lima syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi dalam pembangunan pertanian yakni, 1) Pemasaran hasil, 2) Penerapan teknologi, 3) Tersedianya sarana produksi, 4) Perangsang produksi bagi petani, dan 5) Pengangkutan, meskipun kelima faktor tersebut dapat dipenuhi namun masih ada faktor-faktor pelancar yang perlu mendapat perhatian bila ingin memperlancar pembangunan pertanian, salah satu diantaranya adalah pendidikan

pembangunan pertanian yang selama ini lebih dikenal dengan penyuluhan Pertanian.

Strategi umum untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian tercantum di dalam Rencana Pembangunan Pertanian 2005 - 2009 yang tertuang dalam buku Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) 2005 adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan manajemen pembangunan yang bersih transparan dan bebas KKN, 2) Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan pertanian, 3) Memperluas dan memanfaatkan basis produksi secara berkelanjutan, 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memberdayakan SDM pertanian
- 5) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian,
- 6) Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna
- 7) Mempromosikan dan memproteksi komoditas pertanian.

Berdasarkan strategi umum tersebut selanjutnya dikemukakan beberapa kebijakan antara lain; 1) Kebijakan dalam pelaksanaan manajemen pembangunan yang bersih, transparan, dan bebas KKN, diarahkan untuk menyusun kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai disertai penerapan *reward and punishment* secara konsisten; 2) Kebijakan dalam peningkatan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan pertanian diarahkan untuk a). Peningkatan keterbukaan dalam perumusan kebijakan dan manajemen pembangunan pertanian; b). peningkatan evaluasi, pengawasan dan pengendalian

manajemen pembangunan pertanian; c) Penyelarasan pembangunan pertanian antar sektor dan wilayah; 3).Kebijakan dalam memperluas dan meningkatkan basis produksi secara berkelanjutan diarahkan untuk. a), peningkatan investasi swasta; b) penataan hak, kepemilikan dan penggunaan lahan; c) kebijakan perwilayahan komoditas ; dan d) penataan sistem pewarisan lahan pertanian; 4) Kebijakan dalam meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan SDM pertanian diarahkan untuk a). untuk menyusun kebijakan revitalisasi penyuluhan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan pertanian; b) peningkatan peran serta masyarakat; c) peningkatan kompetensi dan moral aparatur pertanian; d) penyelenggaraan pendidikan pertanian bagi petani, dan e) pengembangan kelembagaan petani.

Block dalam Ibrahim,dkk (2003) mengemukakan bahwa setiap staf organisasi penyuluhan pertanian perlu meningkatkan sikap pelayanan (stewardship) untuk memenuhi kebutuhan petani pelanggan penyuluhan pertanian, selanjutnya Ibrahim menuliskan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja penyuluhan antara lain sebagai berikut.

1). Kebijakan dalam organisasi penyuluh pertanian yang mencakup a) Struktur BIPP/BPP, b) Rasio BPP/ petani, c) Gaji, d) Pangkat dan karier, e) Pendidikan, f) Pelatihan yang disediakan, g) Kejelasan tugas/ wewenang dan h) Rasio penyuluhan pertanian.

2). Prosedur metode (penyusunan program) penyuluh pertanian yang mencakup a) Identifikasi keadaan, b) Identifikasi masalah,

c) Penetapan tujuan, d) Cara mencapai tujuan. 3) Penyuluh pertanian selaku individu yang mencakup, a) Motivasi kedisiplinan. b) Umur, c) Pengalaman, d) Tingkat pendidikan, e) Pelatihan yang diikuti, f) Keahlian, g) Jenjang jabatan fungsional, h) Komitmen profesi (perilaku ideal seorang penyuluh). 4) Peran penyuluh pertanian yang mencakup; a) Produk penelitian, b) Pengalaman petani, c) Aspirasi petani, d) Program pemerintah. 5) Fasilitas penyuluh pertanian dengan cakupan; a) Kantor, b) Perlengkapan penyuluhan, c) Alat transportasi, d) Alat analisis data, dan e) Bantuan operasional.

Menurut Tulus (1995) bahwa manusia merupakan sumberdaya paling penting dalam usaha suatu organisasi mencapai keberhasilannya. Sumber daya manusia ini menunjang organisasi dengan karya, bakat, kreativitas dan dorongan. Betapapun sempurnanya aspek teknologi dan ekonomi, tanpa aspek manusia, sulit kiranya tujuan-tujuan organisasi akan tercapai. Lebih lanjut dikatakan bahwa sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur masukan (input) yang bersama dengan unsur lainnya seperti, bahan, modal, mesin dan teknologi diubah melalui proses manajemen menjadi keluaran (output) berupa barang dan jasa dalam usaha mencapai tujuan organisasi.

Di bagian lain Tulus (Op.cit : 8), mempersamakan manusia dengan mesin. Mesin akan bekerja baik bila dipelihara dan dilumasi dengan baik, demikian pula halnya dengan manusia, harus terlatih dan mendapatkan penghasilan secukupnya, sehingga otomatis akan bekerja baik, ia memiliki

pemahaman yang jelas perihal peranan manajemen dan kebutuhan akan meningkatkan produktivitas namun ia tidak tahu bagaimana menggugah semangat kerja karyawan.

Kemudian Tulus (Loc.cit) berkeyakinan bahwa segala masalah manajemen pada dasarnya merupakan masalah hubungan antar manusia dan bahwa pada dasarnya manusia itu konstruktif dan kooperatif. Adalah menjadi tanggung jawab manajemen untuk mengorganisasi suatu organisasi sedemikian rupa agar orang-orang berperan sepenuh hati dalam segala kegiatannya.

B. Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. (Lembaga Administrasi Negara, 2003).

Selanjutnya dijelaskan ada tiga tahapan untuk mengetahui tingkatan kinerja yaitu: 1) Perencanaan kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kegiatan ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda

penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu, 2) Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang terdiri dari masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengelola masukan menjadi keluaran yang telah menjadi sasaran dan tujuan; 3) Evaluasi kinerja dilakukan bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa akan datang. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa ada lima faktor yang menjadi dasar pengukuran kinerja yakni : 1) *Input*, 2) *Output*, 3) *Outcome*, 4) *Benefit*, dan 5) *Impact* (LAN, Ibid hal : 20)

Penjelasan kinerja yang dikemukakan oleh Lembaga Administrasi Negara tersebut pada dasarnya seirama dengan penjelasan terdahulu, hal ini dapat dilihat dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja. Bila dihubungkan dengan kondisi kinerja penyuluh pertanian saat ini pada dasarnya belum dilaksanakan, karena disamping issue penilaian kinerja ini relatif baru, juga yang menjadi sasaran penilaian akuntabilitas instansi pemerintah hanyalah proyek-proyek yang dilaksanakan,

sementara yang bersifat kegiatan rutinitas tupoksi penyuluh belum dilakukan evaluasi dengan metode akuntabel. dalam arti kata model evaluasi penyuluhan yang dilakukan masih bersifat perbandingan antara rencana dan realisasi.

C. Penyuluhan

Van der Ban dan Hawkins (1999) ,mengemukakan bahwa penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar dari berbagai alternative pemecahan masalah, walaupun tidak semua permasalahan dapat dipecahkan oleh penyuluhan.

Sistem penyuluhan pertanian meliputi komponen kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, prasarana dan sarana serta pembiayaan yang mantap dan mendapatkan kepastian sehingga pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian lainnya dapat dilaksanakan secara baik, teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya sistem pertanian selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang kuat dan lengkap, tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi petani, pelaku usaha pertanian lainnya dan penyuluh pertanian. Penyuluhan pertanian masih dipahami secara berbeda-beda oleh berbagai kalangan. (Rancangan undang-undang Sistem Penyuluhan pertanian , 2005).

Selanjutnya dinyatakan pula bahwa Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) adalah aparat pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan secara intensif melalui kunjungan lapangan secara periodik untuk menyampaikan informasi dan membahas serta memecahkan masalah usahatani secara bersama-sama. Melalui proses kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh penyuluh pertanian lapangan bersama-sama dengan petani diharapkan akan terjadi interaksi dalam menyerap teknologi baru yang berwawasan hamparan kelompok .

Wiriaatmadja (1977) ; menyatakan bahwa penyuluhan merupakan suatu sistem pendidikan (belajar- mengajar) yang dalam prakteknya menggunakan cara-cara seperti peniruan, pembujukan dan propaganda dengan menghindari hal-hal yang bersifat perintah dan pemaksaan. Sementara itu Keputusan Menteri Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No19/Kep/MK.Waspan/5/1999 menjelaskan bahwa penyuluhan pertanian adalah pendidikan luar sekolah dibidang pertanian yang ditujukan bagi petani nelayan dan keluarganya, serta anggota masyarakat pertanian agar dinamika dan kemampuannya dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatan sendiri dapat berkembang, sehingga dapat meningkatkan peranannya dalam pembangunan pertanian.

Selanjutnya Wiriaatmadja (Ibid) juga menyatakan bahwa penyuluhan adalah suatu sistem pendidikan di luar sekolah untuk keluarga tani di pedesaan, tempat mereka belajar sambil berbuat untuk menjadi

mau, tahu dan bisa menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapinya secara baik dan menguntungkan serta memuaskan. Ditambahkan pula bahwa penyuluhan pertanian adalah suatu pendidikan yang mengandung filsafat idealisme, pragmatisme serta realisme. Idealisme mengandung makna bahwa penyuluh harus dapat memberikan pengetahuan kepada sasaran penyuluhan sesuatu yang bernilai, dapat dipercaya dan mempunyai jangkauan masa datang. Pragmatisme mengandung arti bahwa hal tersebut dapat dikerjakan secara praktis, mudah dilaksanakan dengan belajar sambil berbuat *Learning by doing* sedangkan realisme mengandung arti penyuluhan harus mengerjakan hal-hal nyata, ilmiah dan objektif, harus sesuai dengan lingkungannya berdasarkan fakta-fakta serta kenyataan yang ada, karena petani pada umumnya baru percaya setelah melihat *Seeing is believing*.

Kemudian di bagian lain Wiriaatmadja dalam Sumodiningrat (2002), berpendapat bahwa salah satu cara untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan petani adalah melalui program pendampingan. Pendampingan tersebut bukanlah suatu hal yang baru, namun akhir-akhir ini istilah pendampingan petani muncul kepermukaan karena adanya berbagai krisis dan tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian. Sejak kegiatan penyuluhan pertanian digalakkan di Indonesia, program penyuluhan dapat dianggap serupa dengan program pendampingan karena penyuluhan pertanian tinggal dan hidup diantara petani, memahami dan ikut membantu petani memecahkan persoalannya.

Ide penyuluhan ini sejalan dengan pernyataan Mosher (1978), bahwa secara eksplisit penyuluhan pada dasarnya sama dengan pendampingan, namun mempunyai perbedaan yakni, penyuluh pertanian belum tentu seorang ahli tetapi lebih tepat adalah penyampai informasi, sementara pendamping disyaratkan memiliki klasifikasi sebagai seorang ahli atau setidaknya lebih memahami persoalan daripada petani. Baik penyuluh maupun pendamping disyaratkan untuk memiliki kontak yang intens dengan petani.

Dengan demikian arti penyuluhan pertanian adalah suatu upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya agar mereka mengetahui dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalah dalam usaha atau dengan kata lain bahwa penyuluhan pertanian merupakan pendidikan formal bagi petani beserta keluarganya agar mereka mau dan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebagai pendidikan non formal, penyuluh pertanian mempunyai potensi yang besar untuk memperluas jangkauan pendidikan bagi masyarakat pedesaan karena terbatasnya pendidikan formal yang ada dan pada waktu yang sama dapat meningkatkan produktivitas serta kualitas usahatani dalam meningkatkan standar hidup mereka.

Musgrave and Musgrave dalam Sumodiningrat (2000) menyatakan bahwa, pembinaan kepada petani dalam bentuk pendampingan penyuluhan patut dilakukan oleh pemerintah, karena apabila hal ini tidak dilakukan maka sistem dan struktur pasar yang

tercipta cenderung akan bias dan tujuan memberdayakan petani sebagai stake holder utama pembangunan pertanian tidak akan tercapai.

Apabila petani tidak dilindungi dan diberikan perlakuan khusus, misalnya dalam bentuk pendampingan maka petani sebagai bagian terbesar rakyat Indonesia akan tergilas oleh sistem ekonomi yang bersaing secara sempurna. Selanjutnya Sumodiningrat (Op.cit) menyatakan pula bahwa ketidaksiapan aparatur dan prasarana serta sistem pengelolaan dalam membangun pertanian. Dicontohkan kelembagaan yang ada sekarang ini sudah seharusnya melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan petani dengan baik, namun karena keterbatasan tenaga atau sumberdaya manusia, terutama pada penyuluh pertanian yang jumlah dan mutunya rendah, mengakibatkan fungsi manajemen pemerintah tidak dapat dilakukan secara sempurna, fungsi ini makin sulit direalisasikan ketika terdapat banyak daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas dan rendahnya sarana komunikasi.

Lebih jauh dikatakan pula bahwa sistem pengelolaan pertanian belum tertata dengan baik dan juga dapat dikatakan tidak antisipatif terhadap perubahan-perubahan. Lebih banyaknya kegiatan proyek daripada kegiatan rutin adalah merupakan salah satu contoh, bahwa memang pengelolaan pembangunan pertanian belum berkembang. Banyak kegiatan seharusnya menjadi tugas rutin pemerintah serta lembaga dan aparat akhirnya diproyekkan (dijadikan kegiatan proyek) karena secara rutin kegiatan-kegiatan tersebut tidak berjalan. Hal ini

terjadi karena memang lembaga dan aparat yang menanganinya tidak mampu melaksanakannya yang disebabkan oleh kelemahan sistem manajemen (pengelolaan). Ketidak-siapan pengelolaan tersebut kemungkinan disebabkan belum berkembangnya sistem itu sendiri dan lemahnya antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan atau pendapat yang dikemukakan tersebut, bila dikaitkan dengan keberadaan penyuluh yang ada di Kabupaten Tana Toraja lagi-lagi memberi gambaran bahwa masih ada kesenjangan yang lebar antara misi yang diemban oleh penyuluh dan tujuan akhir dari penyuluhan itu sendiri.

D. Kerangka Pikir

Untuk meningkatkan kinerja penyuluh dalam memberdayakan petani harus dilakukan upaya pendampingan yang sungguh-sungguh dilakukan oleh penyuluh dengan memperhatikan keragaan kelembagaan yang terdiri dari: 1) Struktur Organisasi Penyuluh , 2) Sumber daya yang meliputi: a) Kemampuan SDM penyuluh, b) Dukungan financial , c) Teknologi dan d) Sarana penyuluhan, dan 3) Aturan dan prosedur kerja atau Tupoksi penyuluh pertanian yang meliputi: a) Persiapan Penyuluhan b) Pelaksanaan Penyuluhan c) Evaluasi Pelaporan, d) Pengembangan Penyuluh Pertanian dan e) Pengembangan Profesi

Mengapa keragaan kelembagaan penyuluh pertanian harus menjadi perhatian utama ?. Hal tersebut sangatlah beralasan karena

ketiga faktor tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi penyuluh pertanian secara baik.

Berikut ini dikemukakan pemikiran yang berkait dengan ketiga faktor keragaan kelembagaan penyuluhan yang diduga memengaruhi kinerja penyuluh sebagai berikut;

1) Struktur organisasi penyuluh, seperti telah dikemukakan terdahulu bahwa organisasi yang menangani penyuluh pertanian di kabupaten Tana Toraja adalah Dinas pertanian dan Pangan yang membawahi sub sektor Tanaman pangan, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan, dengan demikian penyuluh pertanian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya hanya yang berkaitan dengan sub sektor tersebut, itupun masih sebatas pada kegiatan keproyekan dengan kata lain tidak menjadi kegiatan rutinitas, sementara sub sektor hortikultura dan perkebunan berada pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang disatu sisi ada penyuluh kehutanan yang pada dasarnya juga tidak dapat berbuat banyak terhadap sektor hortikultura dan perkebunan.

Dengan demikian sektor perkebunan dan hortikultura tidak tersentuh oleh peran penyuluh. Oleh karena itulah organisasi yang berkaitan dengan penyuluh pertanian tersebut perlu ditata kembali,

2) Sumberdaya. Seperti telah dikemukakan terdahulu bahwa ada empat hal yang berkaitan dengan sumberdaya yakni a) kemampuan SDM penyuluh, yang meliputi umur, pendidikan pangkat/golongan dan lama

bertugas, b) dukungan financial, c) dukungan teknologi, dan d) dukungan sarana penyuluhan.

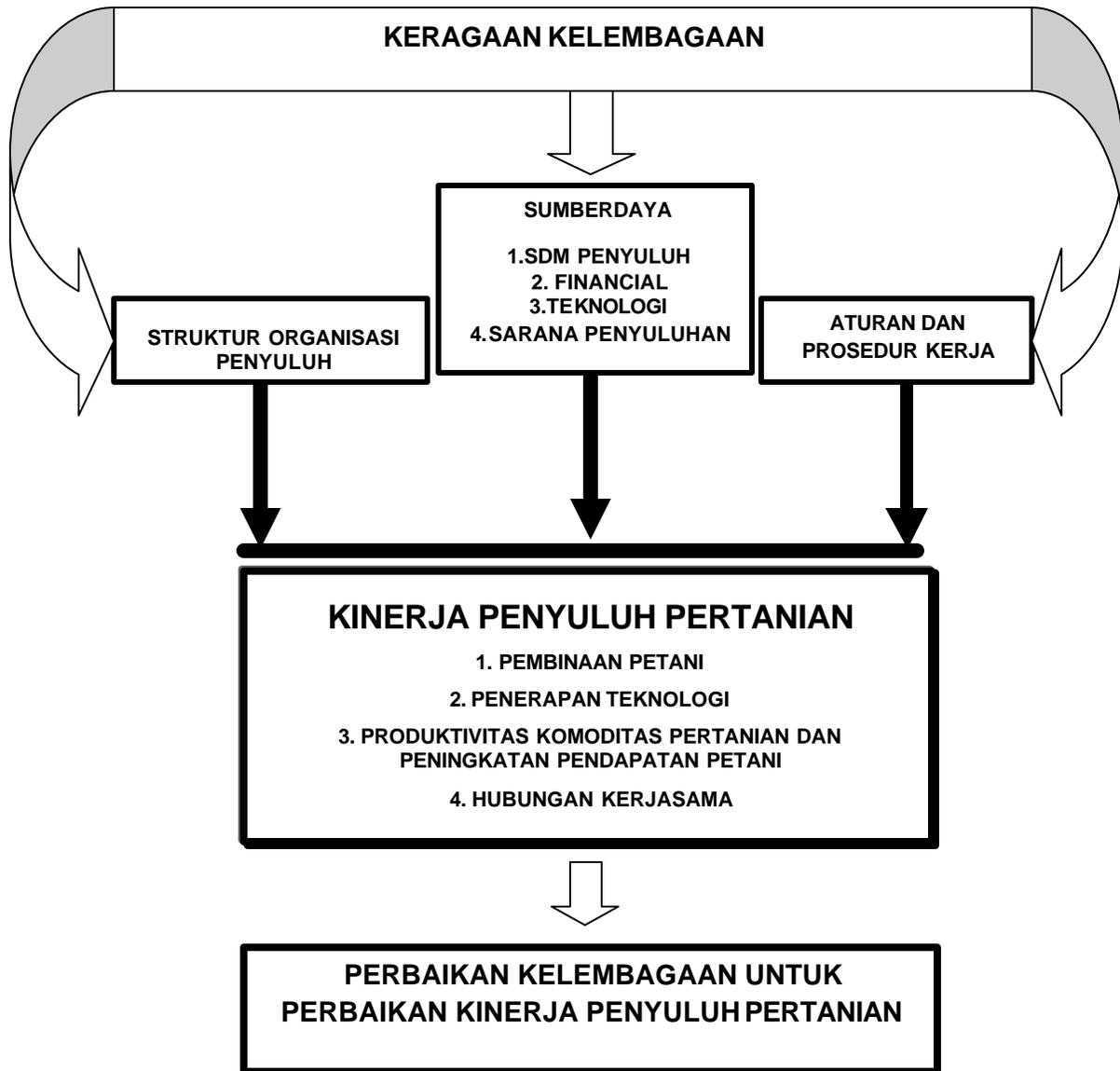
Dari keempat hal tersebut diasumsikan ada dua hal paling berpengaruh terhadap kinerja penyuluh pertanian yakni dukungan financial, dan dukungan sarana penyuluhan. Hal tersebut sangat beralasan karena penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selalu diperhadapkan pada sejauh mana ketersediaan financial dan sarana penyuluhan dapat dipenuhi secara proporsional . Tanpa dukungan kedua hal tersebut maka sebaik apapun penguasaan teknologi dan kemampuan SDM yang dimiliki oleh penyuluh, tidak akan banyak memengaruhi perbaikan kinerja penyuluh 3) Aturan dan Prosedur kerja Penyuluh, terhadap hal tersebut jika dikaitkan dengan kinerja penyuluh, sesungguhnya sudah tertuang dalam tupoksi penyuluh. Di dalamnya telah diatur bagaimana tugas pokok, dan fungsi dari seorang penyuluh pertanian, apa saja yang harus dilakukan dan dikerjakan oleh penyuluh, termasuk didalamnya aturan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional. Akan tetapi fakta berkata lain, aturan dan prosedur kerja tersebut ternyata tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya .Hal tersebut diasumsikan terjadi mungkin disebabkan oleh karena kurang terpenuhinya aspek organisasi dan aspek sumberdaya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa keragaan kelembagaan penyuluh pertanian yang terdiri dari organisasi penyuluh, dukungan sumberdaya dan aturan & prosedur kerja terkait satu sama lain

dan saling mendukung dalam menentukan tingkat kinerja Penyuluh Pertanian.

Apabila komponen keragaan kelembagaan penyuluh pertanian tersebut terpenuhi maka diduga akan memperbaiki penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan dapat meningkatkan kinerja penyuluh pertanian, yang pada gilirannya diharapkan dapat menjadi bahan atau alternative rumusan rekomendasi perbaikan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Tana Toraja. Kerangka pikir tersebut dikemukakan pada Gambar 1.

Gambar 1. Gambaran Kerangka Pikir Penelitian



E. HIPOTESIS

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang akan dicapai serta relevansi alat analisis yang digunakan maka hipotesis yang diajukan adalah:

1. Keragaan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten Tana Toraja belum sesuai dengan harapan .
2. Organisasi, sumber daya, serta aturan dan prosedur kerja memberikan kontribusi positif terhadap kinerja penyuluh pertanian di kabupaten Tana Toraja.

F .Batasan Pengertian

Guna menyamakan persepsi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, diperlukan batasan pengertian, atau definisi operasional sebagai berikut :

- 1) Strategi adalah suatu cara menggunakan kecakapan dan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui penerapan tugas dan fungsi penyuluh pertanian yang meliputi, perencanaan/ persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi pelaporan, pengembangan penyuluh Pertanian, dan pengembangan profesi;
- 2) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan atau sasaran berdasarkan hasil pengukuran eektivitas kinerja penyuluh pertanian ;

- 3) Penyuluh adalah aparat pemerintah yang ditempatkan di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) dan bertugas melakukan pendampingan dan bimbingan secara terus-menerus kepada petani dan keluarganya ;
- 4) Kelembagaan penyuluhan adalah bagian dari pranata sosial atau aturan-aturan main yang menjadi pedoman kerja dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang terdiri dari unsur-unsur atau variabel struktur organisasi penyuluh, sumberdaya penyuluh serta aturan dan prosedur kerja
- 5) Keragaan kelembagaan adalah bentuk dan tampilan atau kondisi dari organisasi penyuluh pertanian, sumberdaya serta aturan dan prosedur kerja.
- 6) Dukungan financial adalah dukungan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan yang berasal dari APBD/ APBN ataupun sumber dana lainnya
- 7) Sarana Penyuluhan adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung dan memperlancar kegiatan penyuluhan pertanian
- 8) Aturan dan prosedur adalah metode atau cara yang digunakan dalam melaksanakan tupoksi penyuluh pertanian untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan fungsi-fungsi manajemen ;
- 9) SDM penyuluh adalah kemampuan internal individu penyuluh yang dipengaruhi oleh tingkat kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap

- 10) Variabel-variabel yang diukur adalah: variabel kinerja, digunakan symbol Y, variabel organisasi penyuluh dengan symbol X1, variabel sumber daya dengan symbol x2, serta variabel aturan dan prosedur kerja menggunakan symbol x3
- 11) Responden terdiri dari koordinator penyuluh dan penyuluh pertanian pada masing-masing WKBPP
- 12) Informan adalah petani atau kontak tani yang merupakan sumber informasi yang berperan memperkuat jawaban responden pada variabel kinerja (Y). Bentuk lain dari penyajian informasi-informasi dari petani tersebut disajikan dalam bentuk cuplikan narasi-narasi yang dikemukakan langsung oleh petani atau kontak tani pada saat wawancara dilakukan
- 13) Komponen alat ukur variabel kinerja penyuluh (Y) adalah dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penyuluhan pertanian terhadap petani atau kelompok tani yang meliputi pembinaan petani, penerapan teknologi, produktivitas komoditas utama pertanian, dan hubungan kerja sama dengan lembaga terkait yang terdiri dari 19 item pernyataan seperti tertera dalam lampiran kuesioner
- 14) Komponen alat ukur variabel organisasi (X1) terdiri dari delapan item pernyataan seperti tertera dalam lampiran kuesioner.

- 15) Komponen alat ukur variabel Sumber daya (X2) meliputi SDM Penyuluh, Finansial, Teknologi dan Sarana Penyuluhan yang terdiri dari 13 item pernyataan seperti tertera pada lampiran kuesioner
- 16) Komponen alat ukur variabel aturan dan prosedur kerja (X3) meliputi Persiapan penyuluhan lapangan, Pelaksanaan penyuluhan Pertanian, Evaluasi dan pelaporan, Pengembangan Penyuluhan Pertanian dan pengembangan profesi yang terdiri dari 30 item pernyataan
- 17) Organisasi adalah lembaga yang menjadi wadah penyuluh Pertanian
- 18) WKBPP merupakan singkatan dari Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian adalah pembagian administrasi wilayah kerja penyuluh berdasarkan penempatan Balai penyuluhan pertanian, cakupan wilayahnya meliputi 2– 3 wilayah kecamatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif yang menggambarkan atau menjelaskan seluruh aspek yang terjadi pada penelitian.

B. Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tana Toraja dengan objek penelitian adalah para penyuluh pertanian di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) sebagai responden dan petani sebagai informan. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan, dimulai dari Tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Nopember 2006

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah penyuluh pertanian Kabupaten Tana Toraja yang tersebar di 15 Balai Penyuluhan Pertanian dan kontak tani yang juga tersebar di wilayah tersebut. Penyuluh pertanian yang terpilih akan menjadi responden sedangkan kontak tani yang terpilih akan menjadi informan.

2. Sampel

Berdasarkan tingkat homogenitasnya yang cukup tinggi, dilihat dari rata-rata pengalaman, masa kerja dan pendidikan formal para penyuluh, maka teknik pemilihan sampel dilakukan dengan cara penggabungan purposive sampling dan random sampling. Penggunaan purposive sampling dengan menentukan 2 orang sampel dari masing-masing BPP yang terdiri dari 1 orang koordinator penyuluh, 1 orang penyuluh pertanian lapangan dan 2 orang kontak tani /petani sebagai informan dari masing-masing WKBPP. Selanjutnya penggunaan random sampling hanya dilakukan untuk menentukan individu penyuluh pertanian dan kontak tani dengan cara mengundi populasi yang telah terdaftar dalam kerangka sampel. Dengan demikian jumlah sampel yang terpilih sebanyak 60 orang dengan rincian 30 orang Penyuluh pertanian sebagai responden dan 30 orang kontak tani/petani sebagai informan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang akan menjadi bahan pada pelaksanaan penelitian tersebut adalah :

1. Data primer, yang merupakan data yang diperoleh melalui hasil penelitian langsung terhadap objek yang akan diteliti, seperti data organisasi, data Sumber daya , data-data Aturan prosedur kerja Serta data – data Kinerja Penyuluh yang dilakukan oleh masing-masing responden ataupun informan melalui proses wawancara , dan observasi berdasarkan kuesioner .

2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain dokumentasi/ tulisan dalam bentuk buku-buku, laporan-laporan, surat-surat keputusan, karya ilmiah, hasil-hasil penelitian serta informasi-informasi tertulis dalam surat kabar ataupun informasi lisan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data akurat dan erat kaitannya dengan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Pengamatan langsung (Direct Observation), metode ini dipergunakan sebagai salah satu piranti atau alat dalam mengumpulkan data berdasarkan pengamatan secara langsung terhadap unsur-unsur yang berhubungan dengan kegiatan penyuluhan pertanian di Kabupaten Tana Toraja. Maksud dari pengamatan ini adalah melihat langsung hal-hal yang berkaitan hasil kegiatan penyuluh pertanian pada kelompok tani, misalnya penerapan teknologi dan pola tanam
2. Wawancara merupakan salah satu bentuk metode pengumpulan data secara langsung antara peneliti dan responden atau informan, dengan menggunakan instrumen kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui tanggapan terhadap variabel-variabel yang diteliti dan menginventarisir permasalahan-permasalahan yang menyebabkan

lemahnya kinerja penyuluh pertanian, dan mencari strategi yang dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang lebih mendalam, dan selanjutnya dihubungkan dengan teori-teori yang telah ada yang pada akhirnya dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah kabupaten Tana Toraja.

3. Kuesioner adalah alat yang digunakan dalam bentuk pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden dan informan pada saat pelaksanaan Wawancara dilaksanakan yang berfungsi sebagai komponen utama dalam memperoleh data yang sesuai dengan keperluan penelitian.
4. Studi kepustakaan (Library research), adalah merupakan kegiatan untuk memperoleh data melalui telaahan kepustakaan yang akan digunakan untuk membentuk kerangka teoritis yang berhubungan dengan objek penelitian

F. Analisis Data

Untuk mendapatkan gambaran hasil penelitian tersebut sesuai dengan perumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dan hipotesis maka analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan keragaan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Tana Toraja dilakukan dengan cara menggunakan tipe skala Likert yang merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau

gejala sosial . Dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi sub variabel kemudian menjadi indikator-indikator yang dapat diukur . Indikator- indikator tersebut selanjutnya dijadikan titik tolak untuk membuat item instrument berupa pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden dalam bentuk interpretasi skor.

Interpretasi skor tersebut dibagi menjadi lima kriteria yaitu; a) Kriteria Sangat Baik dengan symbol (SB) diberi bobot 5; b) Kriteria Baik dengan symbol (B) diberi bobot 4; c) Kriteria Sedang dengan symbol (S) diberi bobot 3; d) Kriteria Kurang dengan symbol (K) diberi bobot 2 dan; e) Kriteria Sangat Kurang dengan symbol (SK) diberi bobot 1. (Riduwan,2005)

Selanjutnya untuk mengetahui posisi kriteria interpretasi skor pada masing-masing variabel yang ditanggapi oleh responden dilakukan dengan cara menghitung perkalian antara bobot dengan frekuensi pilihan jawaban responden. Hasil dari perkalian tersebut disebut skor. Kemudian skor tersebut dibagi dengan skor maksimal yang ada pada masing-masing variabel dikalikan dengan 100 %. Dengan demikian Kriteria interpretasi Skor dapat diketahui.

Kriteria interpretasi skor yang dimaksud adalah sebagai berikut

- a) 81 % - 100 % = Baik Sekali
- b) 61 % - 80 % = Baik
- c) 41 % - 60 % = Sedang
- d) 21 % - 40 % = Kurang
- e) 0 % - 20 % = Kurang Sekali

2. Untuk mengukur pengaruh variabel-variabel, struktur organisasi, aturan dan prosedur kerja serta sumberdaya dengan kinerja penyuluh digunakan uji statistik regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut (Kleinbaun,D.G dan Kupper,L.L.1978)

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Y = Tingkat kinerja penyuluh

X₁ = Variabel Organisasi penyuluh

X₂ = Variabel Sumberdaya penyuluh

X₃ = Variabel Aturan dan prosedur kerja penyuluh

β₀ = Konstanta

β₁, β₂, β₃. = adalah koefisien regresi partial

e = Kesalahan baku

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Tana Toraja yang tersebar pada 40 Wilayah Kecamatan dengan jumlah Kelurahan/ lembang (desa) sebanyak 268 buah dengan jumlah Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) sebanyak 15 buah. Dari 15 WKBPP tersebut yang telah mempunyai bangunan kantor BPP dan lahan percontohan baru berjumlah 9 buah, selebihnya masih menumpang pada kantor camat dan tidak punya lahan percontohan.

Wilayah Kerja Balai penyuluhan yang telah mempunyai kantor dan lahan untuk percontohan adalah : 1) BPP Mengkendek, yang berlokasi di Lembang Tampo Simbuang yang meliputi wilayah kecamatan Mengkendek dan kecamatan Gandasil, dengan lahan percontohan seluas 0,45 ha ; 2) BPP Sangalla, berlokasi di Kelurahan Kaero meliputi wilayah kecamatan Sangalla, Sangalla Utara, dan Sangalla Selatan dengan luas lahan percontohan 0,15 ha; 3) BPP Bonggakaradeng, berlokasi di Lembang Buakayu meliputi wilayah kecamatan Bonggakaradeng dan Kecamatan Rano dengan lahan percontohan seluas 0,40 ha; 4) BPP To Ao Makale, berlokasi di kelurahan Kamali Pentalluan meliputi tiga kecamatan yaitu kecamatan Makale, kecamatan Makale Utara dan kecamatan Makale Selatan dengan lahan percontohan seluas 0,05 ha;

5) BPP Saluputti berlokasi di kelurahan Rembon meliputi kecamatan Saluputti dan kecamatan Rembon dan Malimbong Balepe dengan lahan percontohan seluas 1,40 ha ; 6) BPP Sanggalangi berlokasi dilembang Palatokke yang meliputi tiga wilayah kecamatan yaitu kecamatan Sanggalangi dan kecamatan Kesu dan kecamatan Sopai yang mempunyai lahan percontohan seluas 0,20 ha ; 7) BPP Rantepao berlokasi di kelurahan Mentirotiku meliputi tiga kecamatan yaitu kecamatan Rantepao, kecamatan Tikala dan kecamatan Tallunglipu;

8) BPP To' Karau berlokasi di kelurahan Pangli yang meliputi kecamatan Sesean dan Sesean Suloara dengan lahan percontohan seluas 1,14 ha ,dan 9) BPP Rindingallo yang berlokasi dikelurahan Pangala yang meliputi tiga wilayah kecamatan yaitu kecamatan Rindingallo, kecamatan Baruppu dan kecamatan Buntu pepasan dengan lahan percontohan seluas 0,10 ha

Adapun BPP yang kantornya sementara menempati kantor Camat dan tidak mempunyai lahan percontohan adalah: 1) BPP Sa'dan yang berlokasi di kantor camat Sa'dan yang wilayah kerjanya meliputi kecamatan Sadan dan kecamatan Balusu; 2) BPP Rantetayo, berlokasi di kantor camat Rantetayo yang meliputi kecamatan Rantetayo, Kecamatan Kurra, Kecamatan Awan Rante Kurra dan kecamatan Dende Piongan; 3) BPP Buntao Rantebua berlokasi di kantor Camat Buntao yang wilayah kerjanya meliputi kecamatan Buntao dan kecamatan Rantebua, 4) BPP Tondon , berlokasi di kantor camat Tondon dengan cakupan wilayah kerja dikecamatan Tondon , kecamatan Nanggala dan ;

5) BPP Simbuang berlokasi di kantor camat Simbuang dengan cakupan wilayah kerja di dua kecamatan yaitu kecamatan Simbuang dan kecamatan Mappak, dan 6) BPP Bittuang berlokasi di kecamatan Bittuang dengan cakupan wilayah kerja di kecamatan Bittuang dan Masanda. Untuk jelasnya pembagian wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian tersebut dikemukakan pada Tabel 1

Tabel 1. Pembagian Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Tana Toraja

No	WKBPP	Kecamatan	Luas Percontohan (ha)	Lahan	Ket.
1	Mengkendek	Mengkendek	0,45		
2	Bonggakaradeng	Gandangbatu Sillanan Bonggakaradeng	0,40		
3	Sangalla	Rano Sangalla	0,15		
4	To,Ao	Sangalla Utara Sangalla Selatan Makale	0,05		
5	Saluputti	Makale Utara Makale Selatan Saluputti	1,40		
6	Sanggalangi	Rembon Malimbong Balepe Sanggalangi	0,20		
7	Rantepao	Kesu Sopai Rantepao	0,02		
8	To,Karau	Tallunglipu Tikala	1,14		
9	Rindingallo	Sesean Sesean Suloara Rindingallo	0,10		
10	Sa,dan	Baruppu Buntu Pepasan Kapala Pitu Sa,dan	-		
11	Rantetayo	Balusu Rantetayo	-		
12	Buntao	Dende Napo Awan Rante Kurra Bangkele Kila Kurra	-		
13	Tondon	Buntao Rantebua Tondon	-		
14	Simbuang	Nanggala Simbuang	-		
15	Bittuang	Mappak Bittuang Masanda	-		

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Tana Toraja 2006

Berdasarkan Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa cakupan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian meliputi 2-3 wilayah kecamatan, kondisi tersebut cukup mempersulit pelayanan Balai Penyuluhan pertanian terutama dalam hal koordinasi dengan para camat.

Selanjutnya bila dilihat dari kondisi lahan percontohan pada masing-masing BPP dapat diketahui bahwa luas lahan percontohan seluruhnya adalah 3,91 ha, apabila dibandingkan dengan jumlah WKBPP yang memiliki lahan percontohan maka ini berarti bahwa rata-rata luas lahan percontohan adalah 0,43 ha/ BPP, kondisi tersebut pada dasarnya belum sesuai dengan harapan karena berdasarkan konsep awal pembangunannya diharapkan setiap BPP mempunyai lahan Percontohan seluas 2,0 ha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (Vademecum Bimas, 1977), hal tersebut terjadi karena untuk mendapatkan lahan percontohan yang sesuai dengan kebutuhan cukup sulit, walaupun ada harganya relatif mahal dan Pemkab sulit mengadakannya, meskipun demikian apa yang ada sekarang, masih lebih baik bila dibandingkan dengan enam BPP lainnya yang masih menumpang di kantor camat dan sama sekali tidak punya lahan percontohan.

Berdasarkan keadaan tersebut menggambarkan bahwa persoalan lahan percontohan BPP harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tana Toraja terutama BPP yang belum mempunyai lahan percontohan. Hal tersebut sangat beralasan karena salah satu fungsi BPP adalah media untuk melaksanakan metode penyuluhan dalam bentuk percontohan

budidaya pertanian secara umum, demonstrasi plot, kaji terap dan sebagainya yang dapat dilihat langsung dan diadopsi oleh petani. Tanpa lahan percontohan maka fungsi BPP tersebut tidak banyak bermanfaat bagi petani, karena prinsip filsafat pragmatisme *Learning by doing* dan filsafat realisme *Seeing is believing* tidak terpenuhi (Wiriaatmadja,1977)

Terlepas dari persoalan kepemilikan lahan percontohan, tidak dipungkiri bahwa ada juga BPP yang sudah punya lahan percontohan justru tidak difungsikan karena tidak ada dukungan anggaran, sebaliknya ada Pengelola BPP yang selama ini belum punya lahan percontohan justru berusaha melakukan percontohan dilahan petani dengan swadana melalui pendekatan personal walaupun jumlahnya tidak banyak.

B. Identitas Penyuluh

Penyuluh Pertanian yang ada dikabupaten Tana Toraja Penyuluh pertanian seluruhnya berjumlah sebanyak 89 orang, yang terpilih menjadi responden berjumlah 30 orang atau sebesar 33,7 %, 15 orang dari sampel tersebut merupakan koordinator penyuluh sekaligus sebagai pengelola BPP, sedangkan 15 orang lainnya adalah penyuluh pertanian lapangan pada masing-masing WKBPP. Masa kerja penyuluh pertanian dikabupaten Tana Toraja berkisar antara 5 sampai 35 tahun, masa kerja 5-10 tahun sebanyak 7 orang atau 7,86 %, 11-20 tahun sebanyak 35 orang atau sebanyak 39,3 %, 21-30 tahun sebanyak 41 orang atau 46,1%, 31-35 sebanyak 6 orang atau 6,74 %, sementara itu sebaran masa kerja

Penyuluh yang menjadi responden adalah 5-10 tahun 1 orang atau 3,3 %, 11- 20 tahun 4 Orang atau 13,33 %, 21 -30 tahun 23 orang atau 76,66 % dan 31-35 tahun 2 orang atau 6,66 %.

Tingkat pendidikan keseluruhan penyuluh yang ada di kabupaten Tana Toraja terdiri dari 44 orang berpendidikan setara dengan S1 atau 49,4 %, 22 orang berpendidikan D3 atau 24,7 %, 3 orang berpendidikan D4 orang atau 3,3 % dan 20 orang berpendidikan SLTA atau 22,47 %. Sementara itu sebaran tingkat pendidikan formal Penyuluh pertanian yang menjadi responden terdiri dari setara dengan Strata satu (S1) sebanyak 25 orang atau 83,33 %, dan Diploma sebanyak 5 orang atau 16,66 %.

Apabila penyuluh tersebut yang berjumlah 89 orang dikaitkan dengan jumlah sebaran kelurahan dan lembang yang ada di Tana Toraja sebanyak 268 buah maka perbandingannya kurang proporsional, karena rata – rata cakupan wilayah kerja setiap penyuluh pertanian berkisar 2 – 3 kelurahan dan lembang, hal tersebut cukup menyulitkan pelayanan penyuluhan terutama pada wilayah marjinal yang kondisinya sarana transportasi kurang memadai , dalam keadaan demikian maka kebijakan yang terbaik adalah Pemkab diharapkan menambah personil penyuluh pertanian, bila memungkinkan setiap kelurahan atau lembang ditempatkan seorang penyuluh, hal ini dimaksudkan agar para penyuluh pertanian dimasing-masing wilayah tersebut setiap saat dapat berinteraksi dengan petani. Akan tetapi sangat disayangkan justru yang terjadi adalah pengurangan personil penyuluh pertanian dengan memutasi penyuluh

pertanian menjadi pegawai struktural seiring dengan pemekaran wilayah administratif Kelurahan dan lembang yang saat ini telah berjumlah 268 buah.

C. Deskripsi Rumusan Kelembagaan

1 .Variabel Organisasi

Jumlah pernyataan yang digunakan untuk mengukur tanggapan responden terhadap variabel organisasi sebanyak delapan pernyataan . Komponen pernyataan tersebut adalah; 1) Keserasian organisasi Dinas Pertanian dan Pangan dengan kebutuhan penyuluh, maksud dari pernyataan adalah untuk mengukur sejauh mana posisi penyuluh pertanian tersebut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan apakah sudah sesuai penempatannya dalam struktur organisasi Dinas Pertanian dan pangan; 2) Hubungan kerja penyuluh pertanian dengan subsektor dalam lingkup Dinas Pertanian dan Pangan, pernyataan tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh hubungan kerja yang terjalin antara masing – masing sub dinas yang ada dalam ruang lingkup Dinas Pertanian dan Pangan berikut seksi - seksinya. Apakah setiap sub dinas sudah berkoordinasi dan memanfaatkan penyuluh pertanian lapangan sebagai pendamping teknis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya dilapangan; 3) Hubungan kerja penyuluh pertanian dengan subsektor dalam lingkup sub dinas Perkebunan dan sub dinas Hortikultura pada Dinas Kehutanan dan perkebunan, pernyataan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh tingkatan hubungan kerja

sama penyuluh pertanian yang terjalin dengan subdin perkebunan dan hortikultura pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang secara organisasi berada diluar struktur yang mewadahi penyuluh pertanian, karena secara fungsional seorang penyuluh dapat saja berhubungan dengan kedua sub dinas tersebut; 4) Program dan rencana kerja Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan mengakomodir tupoksi penyuluh pertanian, pernyataan tersebut dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana tugas pokok dan fungsi penyuluh pertanian menjadi bagian dari program dan rencana kerja dari Dinas Pertanian dan Pangan; 5) Proses perencanaan Program Dinas Pertanian dan pangan melibatkan penyuluh pertanian, pernyataan tersebut dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana penyuluh pertanian terkait dan berperan dalam proses penyusunan program Dinas Pertanian dan Pangan; 6) Pelaksanaan program kerja Dinas Pertanian dan pangan melibatkan penyuluh pertanian, pernyataan tersebut dikandung maksud untuk mengetahui seberapa besar penyuluh pertanian dimanfaatkan dan diberi peran oleh Dinas Pertanian dan Pangan dalam pelaksanaan kegiatannya; 7) Proses perencanaan dan program kerja subdinas perkebunan dan subdinas hortikultura pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan melibatkan penyuluh pertanian , hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah penyuluh pertanian dilibatkan dalam proses penyusunan program kerja subdinas perkebunan dan subdinas hortikultura yang merupakan bagian dari tupoksi penyuluh pertanian, dan; 8) Pelaksanaan program kerja subdin perkebunan dan subdin hortikultura

pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, pernyataan tersebut di kandung maksud untuk mengukur sejauh mana subdinas perkebunan dan subdinas hortikultura menggunakan penyuluh pertanian sebagai pendamping teknis dalam melaksanakan kegiatannya.

Berdasarkan uraian pada BAB III bagian F. Analisis data, butir 1 maka tanggapan responden terhadap variabel organisasi dikemukakan seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Tanggapan Responden terhadap Variabel Organisasi (X1)

Pernyataan	Bobot	Frekuensi	Skor Bobot x Frek	%
SB	5	0	0	0
B	4	7	28	2,33
S	3	64	192	16,00
K	2	85	170	14,16
KS	1	84	84	7,00
			474	39,50

Sumber: Hasil Olah data primer Des .2006

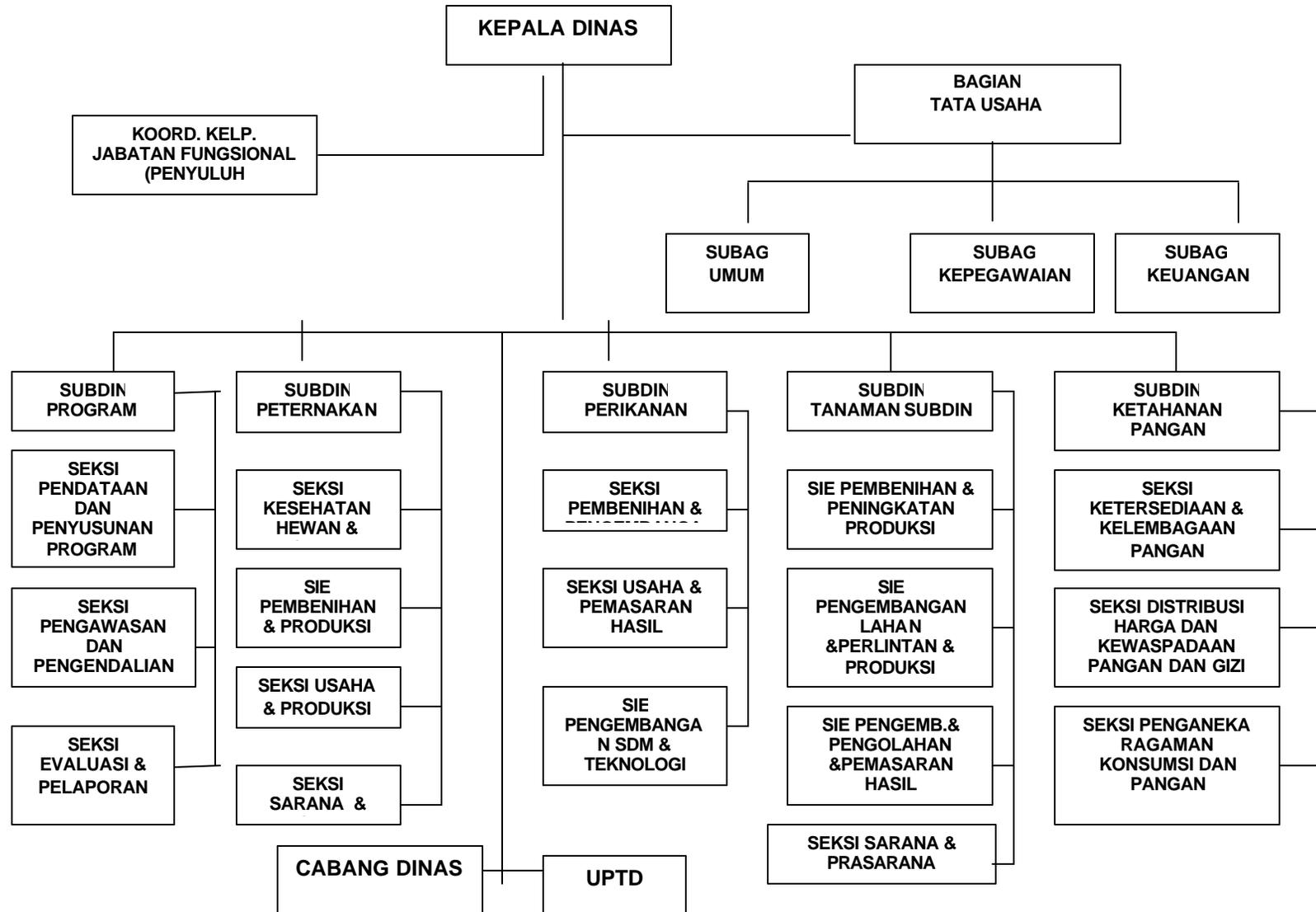
Berdasarkan Tabel tersebut terlihat bahwa responden yang memilih pernyataan pada masing-masing kriteria diuraikan sebagai berikut:

1) Kriteria sangat baik (SB) tidak ada responden yang memilih; 2) Kriteria baik (B) dipilih oleh 5 responden dengan jumlah frekuensi sebanyak 7, apabila jumlah frekuensi tersebut dikalikan dengan bobot pernyataan maka jumlah skornya adalah 28 atau 2,33 %; 3) Kriteria sedang (S) dipilih oleh 30 responden dengan jumlah frekuensi sebanyak 64, apabila

jumlah frekuensi tersebut dikalikan dengan bobot pernyataan maka jumlah skornya adalah 192 atau 16,00 %; 4) Kriteria kurang (K) dipilih oleh 30 responden dengan jumlah frekuensi sebanyak 85, jika jumlah tersebut dikalikan dengan bobot pernyataan maka jumlah skornya adalah 170 atau 14,16 % dan : 5) Pada kriteria kurang sekali (KS) dipilih oleh 30 responden dengan jumlah frekuensi sebanyak 84, jika jumlah tersebut dikalikan dengan bobot pernyataan maka jumlah skornya adalah 84 atau 7,00 %. Dengan demikian skor rata-rata pilihan responden terhadap variabel organisasi 39,50 % dengan kata lain interpretasi skor responden terhadap variabel organisasi (X1) yang mewadahi penyuluh pertanian adalah **Kurang**.

Kurangnya peran organisasi yang menjadi wadah penyuluh pertanian tersebut antara lain disebabkan oleh struktur organisasi Dinas Pertanian dan pangan yang tidak mengakomodir keseluruhan sektor pertanian yang menjadi sasaran Tupoksi penyuluh pertanian, hubungan kerja penyuluh dengan masing-masing sub dinas tidak berjalan sebagaimana mestinya serta keterlibatan penyuluh dalam proses penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan, untuk jelasnya, berikut ini dikemukakan bagan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Tana Toraja pada Gambar 1

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2000.



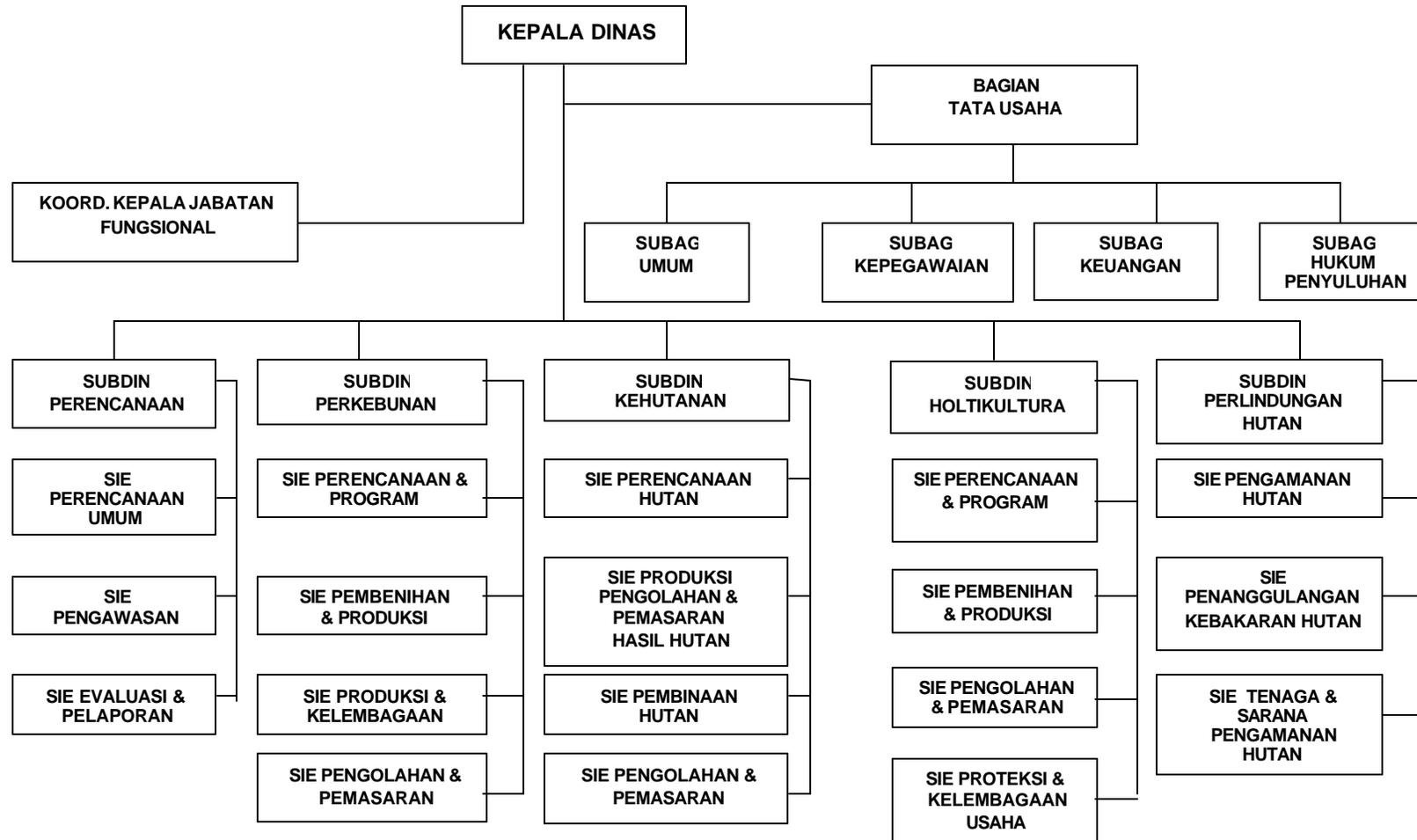
Berdasarkan Gambar Struktur Organisasi tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Tana Toraja mempunyai struktur eselon II yang dijabat oleh Kepala Dinas, eselon III a sebanyak 6 buah yang terdiri dari : 1). Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahi tiga sub bagian, 2) Sub Dinas Program yang membawahi tiga seksi, 3) Sub Dinas Peternakan membawahi empat seksi, 4) Sub Dinas Perikanan membawahi tiga seksi, 5) Sub Dinas Tanaman Pangan membawahi empat seksi, dan 6) Sub Dinas Ketahanan Pangan membawahi tiga seksi. Adapun Eselon III b yang terdiri dari cabang dinas yang berada ditingkat kecamatan dan UPTD sampai sekarang belum terisi atau belum efektif. Selain itu terdapat pula organ kelompok fungsional yang dalam hal ini ditempati oleh penyuluh pertanian .

Bila dilihat dari garis hubungan kerja, posisi kelompok fungsional penyuluh pertanian hanya berhubungan langsung dengan kepala dinas artinya hanya bertanggung jawab pada kepala dinas, sementara hubungan kerja dengan organ-organ lainnya tidak nyata kecuali hal yang bersifat administratif yang berkaitan dengan administrasi kepangkatan dan penggajian penyuluh, jadi seolah-olah penyuluh pertanian berada diluar sistem. Pada hal penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya justru sangat erat kaitannya dengan organ-organ teknis lainnya. Hal tersebut mengakibatkan penyuluh pertanian bekerja tidak berada dalam pola yang teratur.

Demikian pula sebaliknya sub dinas teknis yang terdiri dari Sub Dinas Peternakan, Sub Dinas Tanaman Pangan, Sub Dinas Perikanan, Sub Dinas Ketahanan Pangan, dan Sub Dinas Program sulit mengakses hal-hal yang dibutuhkan dari lapangan misalnya yang berhubungan dengan hasil kegiatan penyuluhan, meskipun demikian tidaklah berarti bahwa selama ini hubungan kerja penyuluh pertanian dengan sub dinas teknis terkait tidak terjalin, sesungguhnya ada hubungan kerja , hanya saja belum optimal dan bentuknya tidak mengikat serta tidak berkelanjutan karena hanya terjadi bila ada kegiatan berwujud proyek, ketika pelaksanaan proyek selesai maka hubungan kerjapun berakhir, pada hal keberhasilan proyek-proyek yang telah dilaksanakan bukan saja diukur dari indikator kinerja input dan output , akan tetapi masih dilanjutkan dengan indikator out come, benefit dan impact yang justru masa pengukurannya pada umumnya dilaksanakan setelah tahun anggaran dari proyek atau kegiatan tersebut berakhir.

Selanjutnya sebagai bahan pembandingan berikut ini dikemukakan Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Perda No 16 Tahun 2000.

Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan Perda NO 16 Tahun 2000.



Berdasarkan gambar struktur organisasi tersebut, dapat dijelaskan bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Tana Toraja juga memiliki lima sub dinas yakni: 1) Sub Dinas Perencanaan, 2) Sub Dinas Kehutanan, 3) Sub Dinas Perlindungan Hutan, 4) Sub Dinas Perkebunan, dan 5) Sub Dinas Hortikultura. Untuk diketahui sebelum Perda nomor 16 tahun 2000 diterbitkan, Sub Dinas Hortikultura merupakan bagian dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Apabila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi penyuluh pertanian terutama yang berkaitan dengan komoditas perkebunan dan hortikultura maka jelas peran penyuluh pertanian secara kelembagaan tidak ada pada dinas ini, sementara pada satu sisi penyuluh kehutanan yang merupakan kelompok fungsional pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan juga tidak dapat berperan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sektor perkebunan dan sektor hortikultura karena ruang lingkup tupoksinya hanya yang berkaitan dengan bidang kehutanan. Dengan demikian petani yang mengusahakan komoditas hortikultura dan komoditas perkebunan tidak memperoleh sentuhan bimbingan atau penyuluhan baik dari penyuluh pertanian maupun dari penyuluh kehutanan.

Kondisi tersebut diperkuat dengan pernyataan salah seorang petani yang bertindak sebagai informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

.ALH. 45 [P]enyuluh pertanian yang ada pada Dinas Pertanian dan Pangan sekarang ini tidak pernah lagi memberikan penyuluhan tentang komoditas hortikultura dan perkebunan karena sektor hortikultura dan perkebunan berada pada Dinas Kehutanan dan perkebunan , mereka (PPL) beralasan bahwa komoditas Hortikultura dan perkebunan bukan kewenangannya.

Akibat dari kondisi tersebut pada gilirannya terimbas pada penurunan kinerja penyuluh pertanian, karena tugas pokok dan fungsi penyuluhan tidak lagi berjalan sebagaimana mustinya. Hal tersebut sejalan dengan hasil studi Bank Dunia dalam Sumodiningrat (2000) yang menyatakan bahwa beberapa titik kelemahan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Indonesia antara lain terjadinya pengkotakan dalam penyelenggaraan penyuluhan yang mengakibatkan kurangnya koordinasi kebijakan penyuluhan pertanian antara sub sektor, tidak jelas, selain itu struktur dan manajemen penyuluhan pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) lemah dan tidak memadai

Bedasarkan uraian tersebut jelaslah kiranya bahwa organisasi yang mewadahi penyuluh pertanian perlu ditinjau kembali agar dapat memenuhi seluruh aspek yang menjadi tupoksi penyuluh pertanian,

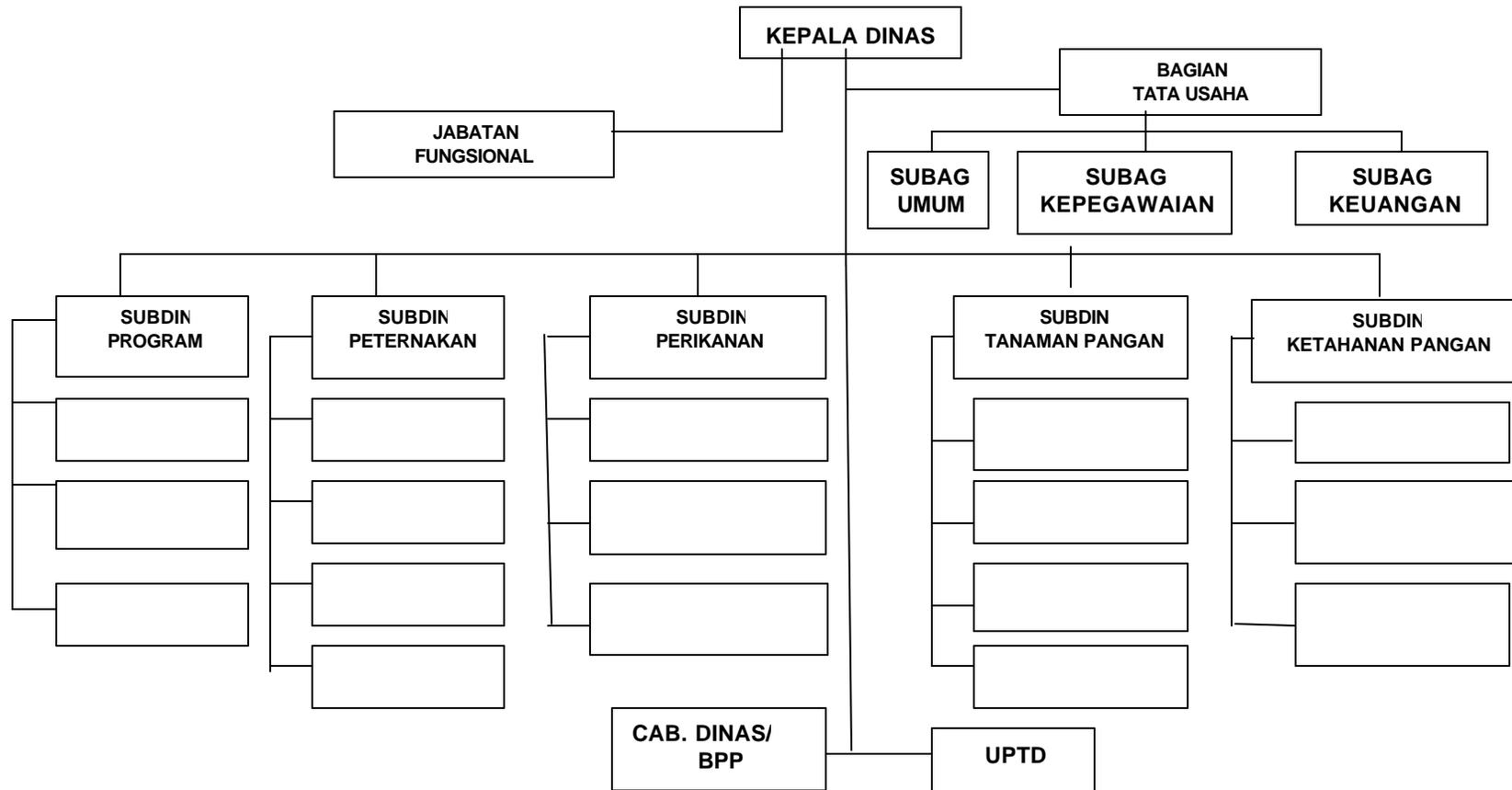
Berikut ini dikemukakan beberapa pilihan bentuk organisasi penyuluh pertanian sebagai berikut :

1. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dijadikan Cabang Dinas atau

UPTD yang belum terisi pada Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan

Adapun bentuk organisasi Dinas Pertanian dan Pangan yang dimaksud seperti dikemukakan pada Gambar 4

Gambar 4. Pilihan Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan ,dengan Menempatkan BPP sebagai Kantor Cabang Dinas



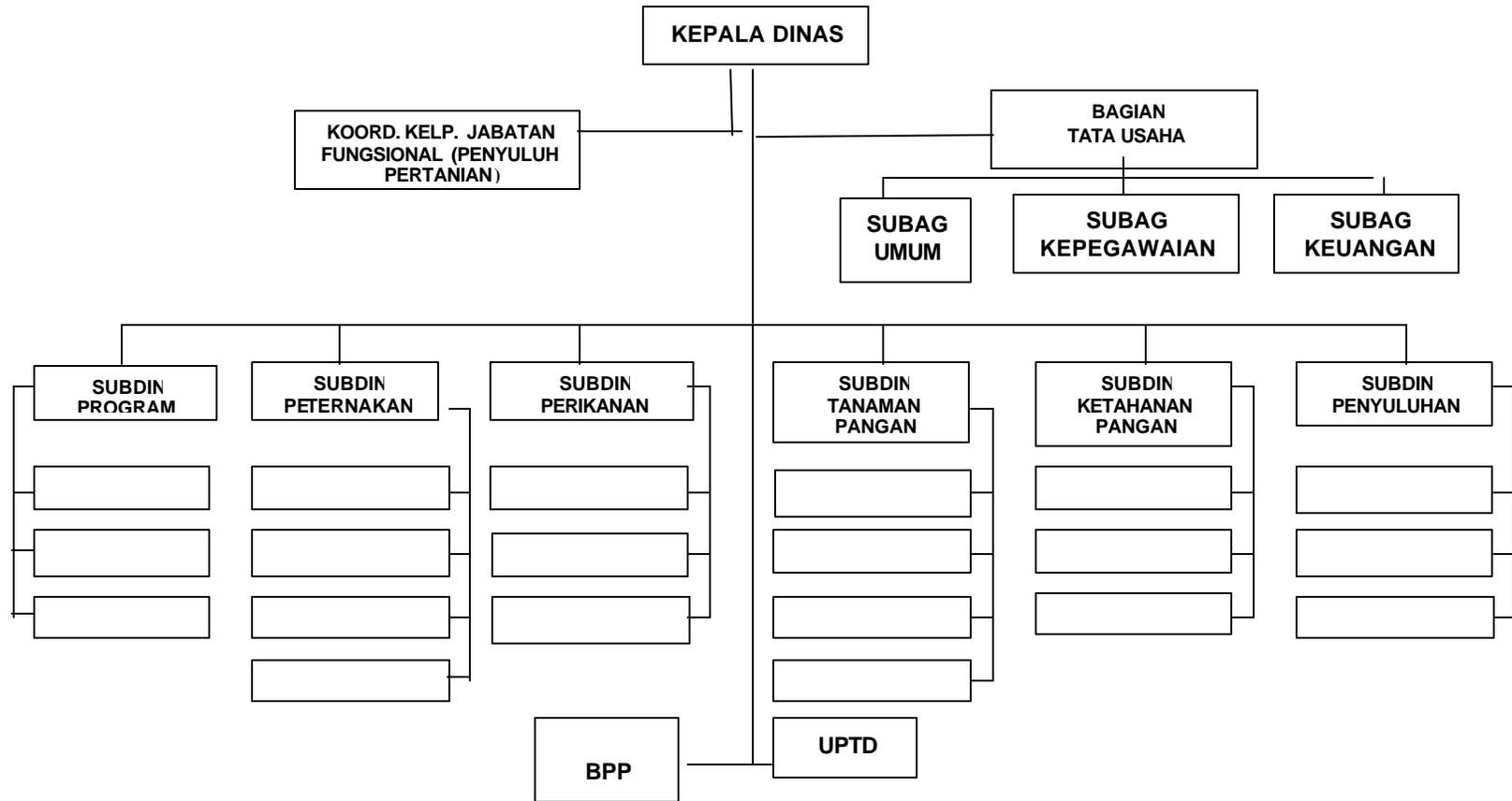
Bagan struktur organisasi tersebut pada dasarnya sama dengan bagan pada gambar 2, hanya yang berbeda adalah Balai Penyuluhan Pertanian yang merupakan wadah penyuluh pertanian diposisikan pada Cabang Dinas.

Apabila Balai Penyuluhan Pertanian dijadikan Cabang Dinas sebanyak 40 kecamatan yang ada maka kemungkinan pelayanan penyuluhan pertanian sedikit akan lebih baik dan terarah jika dibandingkan dengan organisasi yang ada sekarang ini, karena penyuluh pertanian secara struktural sudah dapat mengatur kegiatannya sendiri, walaupun kegiatan yang berhubungan dengan sub dinas perkebunan dan sub dinas hortikultura belum dapat diakses secara baik, karena masih berada diluar organisasi Dinas Pertanian dan Pangan.

Selain itu konsekuensi lain yang muncul adalah membengkaknya anggaran rutin untuk membiayai lembaga tersebut, demikian pula personil yang mengisi organisasi tersebut juga akan bertambah, jika demikian adanya maka pertanyaanpun akan muncul apakah pemerintah daerah sanggup menyediakan anggaran dan personil yang dibutuhkan sementara kondisi sekarangpun anggaran untuk kegiatan penyuluhan belum memadai.

2. Menambahkan Eselon Sub Dinas Penyuluhan pada pada Dinas Pertanian dan Pangan. Adapun bentuk organisasi yang dimaksud Dikemukakan pada gambar 5

Gambar 5. Bentuk Pilihan Bentuk Organisasi Dengan Penambahan Sub Dinas Penyuluhan

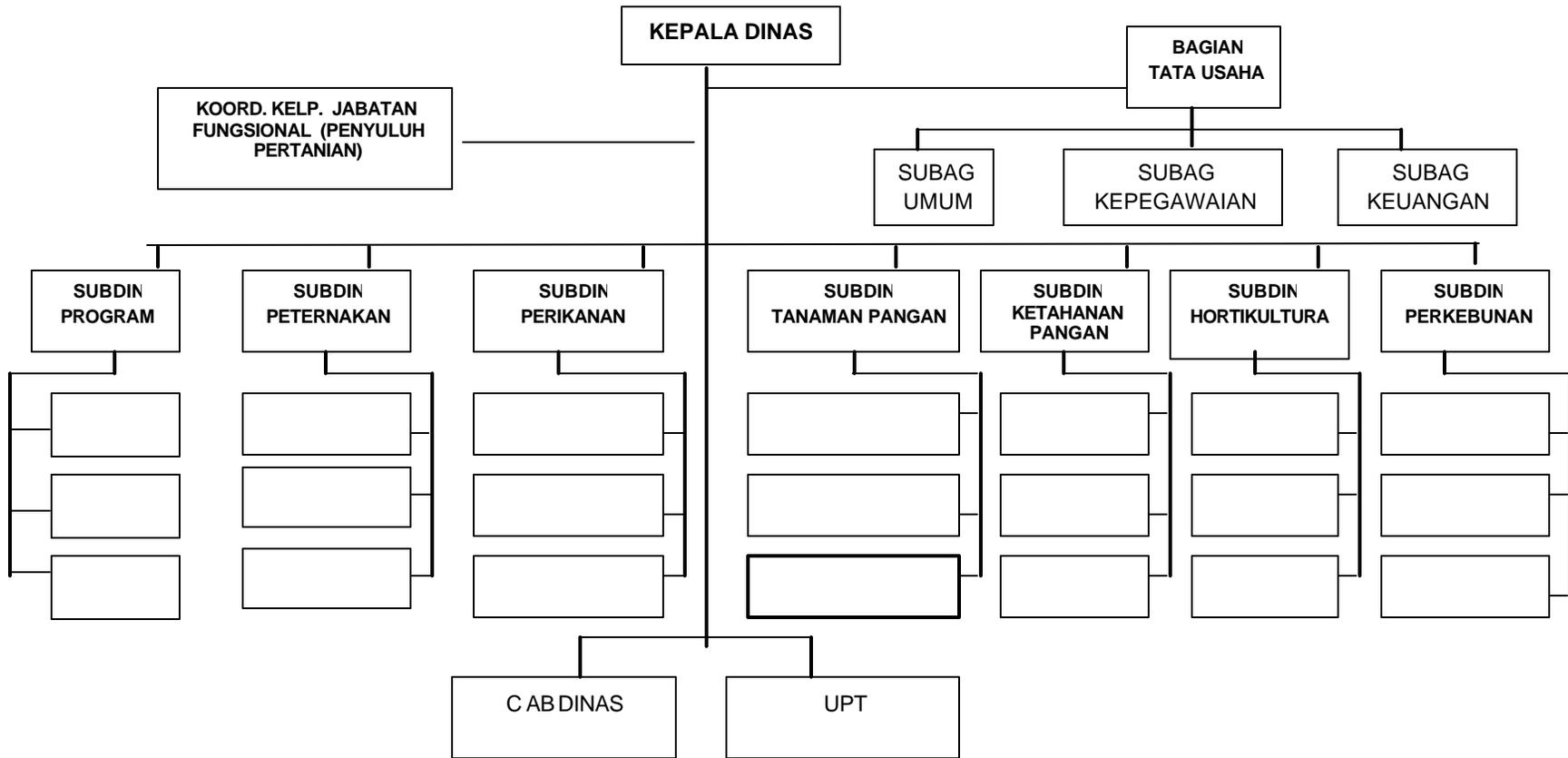


Apabila bagan struktur organisasi pada Gambar 5 tersebut dibandingkan dengan organisasi yang ada sekarang seperti yang tertera pada gambar 2 , maka perbedaan yang terjadi adalah menambahkan eselon sub dinas penyuluhan sehingga jumlah sub dinas menjadi enam buah, maksud dari penambahan sub dinas tersebut antara lain adalah untuk memudahkan penanganan kegiatan – kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi penyuluh, koordinasi antara sub dinas lainnya akan lancar karena kegiatan penyuluhan secara langsung sudah menjadi komponen utama dalam organisasi tersebut, demikian pula anggaran untuk kegiatan penyuluhan juga akan terakomodir, selain itu masalah - masalah penyuluhan yang terjadi dilapangan akan mudah ditangani . Meskipun demikian , bentuk organisasi ini juga masih mempunyai kelemahan karena sektor perkebunan dan hortikultura yang menjadi bagian tupoksi penyuluh masih berada di luar struktur. Akibatnya pelayanan penyuluh pertanian terhadap petani yang mengusahakan komoditas perkebunan dan hortikultura masih mengalami hambatan

3. Menggabungkan Sub Dinas Hortikultura dan Sub Dinas Perkebunan

yang berada pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan ke dalam Dinas Pertanian dan Pangan. Bentuk pilihan organisasi yang dimaksud dapat dilihat pada Gambar 6

Gambar 6; Pilihan Bentuk Struktur Organisasi dengan Penambahan Sub Dinas Hortikultura dan Sub Dinas Perkebunan



Bentuk organisasi pada gambar 6, terjadi penambahan 2 sub dinas yakni sub dinas hortikulutra dan sub dinas perkebunan yang ditarik dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, apabila hal tersebut terwujud maka pelayanan penyuluhan yang berkaitan dengan komoditas hortikultura dan komoditas perkebunan akan terpenuhi dan, penyuluh pertanian secara struktural sudah wajib melakukan penyuluhan yang berhubungan dengan komoditas tersebut. Alasan dari penggabungan kedua sub dinas tersebut antara lain adalah, secara sturktural kedua sektor tersebut melekat pada Departemen pertanian ditingkat pusat, dan khusus untuk sektor hortikultura baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten pada umumnya melekat pada sektor tanaman pangan . Untuk diketahui berdasarkan data yang ada di Sulawesi Selatan hanya ada dua Kabupaten yang memisahkan sektor hortikultura dengan sektor tanaman pangan yakni kabupaten Tana Toraja dan Soppeng

Apabila bentuk pilihan organisasi tersebut dibandingkan dengan bentuk organisasi terdahulu, kelihatannya pelayanan berdasarkan komoditas yang menjadi tupoksi penyuluh pertanian akan lebih baik karena sudah berada dalam satu wadah. Meskipun demikian bentuk organisasi tersebut masih mempunyai kelemahan karena, dilapangan para petani yang menjadi sasaran penyuluhan masih dihadapkan pada masalah dualisme pelayanan penyuluhan baik dari penyuluh pertanian dan penyuluh kehutanan, artinya banyak terjadi satu kelompok masyarakat mempunyai dua atau lebih kelompok pelayanan penyuluhan

berdasarkan komoditas yang diroyekkan baik dari sektor kehutanan ataupun dari sektor pertanian secara umum. Akibatnya kuantitas lembaga kelompok tani lebih besar dibanding kelompok masyarakat yang sebenarnya. Dalam keadaan demikian orientasi pembentukan kelompok- kelompok tani oleh masyarakat hanya karena ada proyek. Ketika proyek tidak ada maka kelompok tersebut tidak ada lagi. Untuk menghindari hal tersebut maka pilihan organisasi pelayanan penyuluhan yang diduga sesuai adalah Membentuk Organisasi khusus yang dapat mewadahi Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Kehutanan secara bersama-sama, agar pelayanan penyuluhan kepada petani secara lintas sektoral dapat terpenuhi dan keberadaan penyuluh tidak terkotak-kotak lagi. Keuntungan lain yang diperoleh adalah personil penyuluh menjadi lebih banyak karena terjadi penggabungan antara penyuluh kehutanan dan penyuluh pertanian, jumlahnya akan menjadi 142 orang yang terdiri dari penyuluh pertanian 89 orang dan penyuluh kehutanan 53 orang, dengan demikian kekurangan tenaga penyuluh akan menjadi seimbang dan terpenuhi . Organisasi yang dimaksud adalah organisasi yang merujuk pada Perda Kabupaten Maros Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan tertanggal 14 Juli 2004.

Bentuk bagan struktur organisasi yang diharapkan adalah seperti dikemukakan pada Gambar 7.

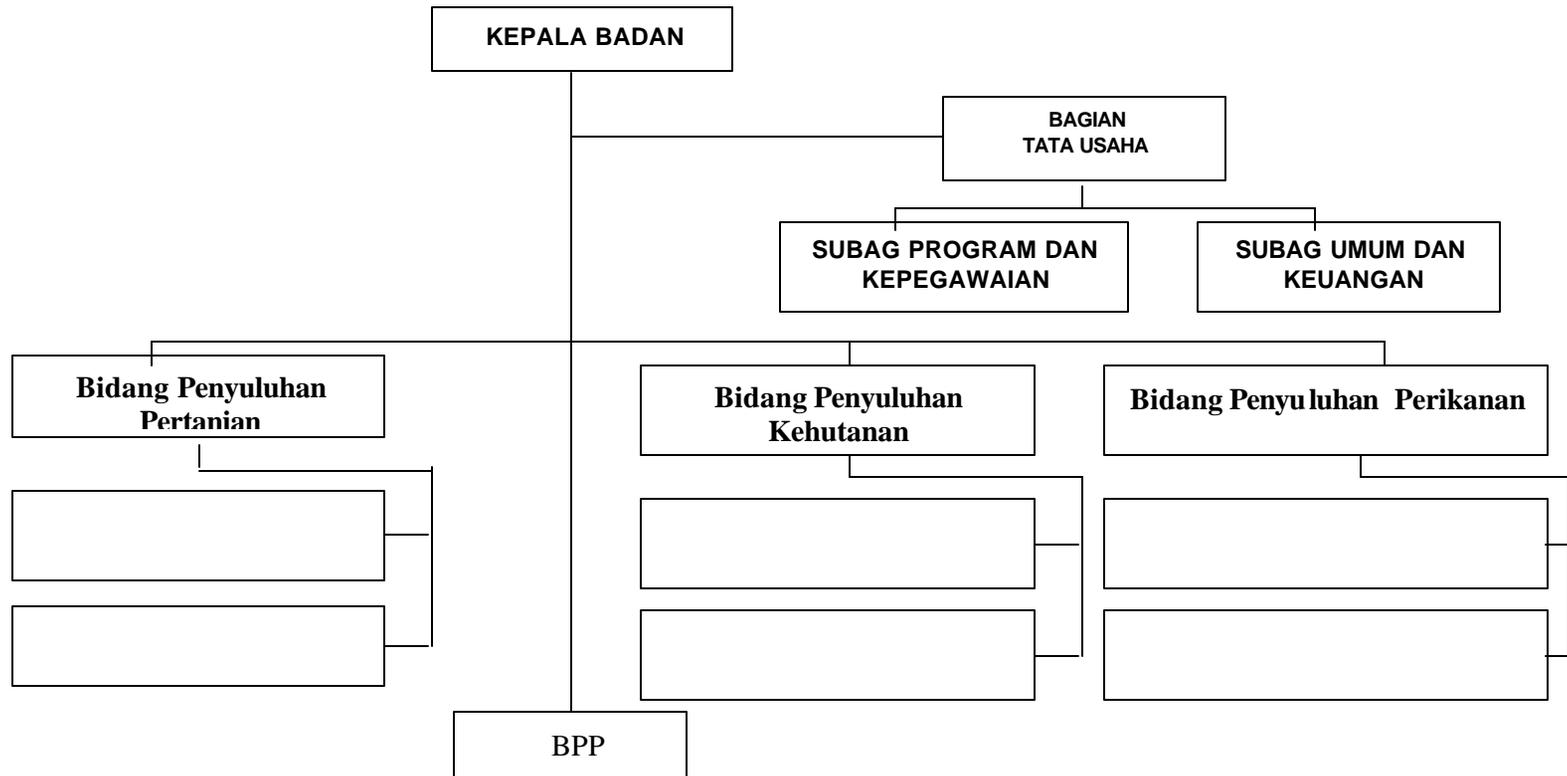
Prinsip kerja dari struktur organisasi tersebut, pada dasarnya adalah terlaksananya kegiatan penyuluhan lintas sektoral, tidak ada lagi pengkotakan kelompok tani, karena administrasi kelompok sudah berada pada satu lembaga, demikian pula penyuluh pertanian dan kehutanan melakukan kegiatan penyuluhan berdasarkan kebutuhan kelompok, dan mendampingi kegiatan keproyekan yang dilaksanakan oleh Dinas – dinas lingkup pertanian dan kehutanan secara langsung

Meskipun demikian pada struktur organisasi tersebut masih mempunyai kelemahan karena masih diperlukan kordinasi dengan Dinas lingkup pertanian dan lingkup kehutanan, karena tanpa koordinasi yang baik dengan dinas terkait tersebut maka tujuan untuk memberdayakan kelompok tani tidak akan tercapai dengan baik.

Selain pilihan bagan struktur organisasi tersebut, masih ada satu pilihan bagan struktur yang lain sejalan dengan telah diterbitkannya undang-undang penyuluhan pada pada bulan Oktober Tahun 2006, berkaitan dengan itu telah diadakan sosialisasi tentang undang-undang penyuluhan tersebut pada bulan tersebut yang berlangsung di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan nara sumber dari Pusat penyuluhan Departemen Kehutanan, Salah satu hal yang menarik dalam sosialisasi tersebut adalah, penjelasan mengenai lembaga atau struktur organisasi penyuluhan ditingkat pusat pada Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian dan Departemen Kelautan dan Perikanan dikelola oleh eselon Badan Pengembangan SDM pada

masing-masing Departemen, selanjutnya ditingkat provinsi dan kabupaten lembaga penyuluhan tersebut disatukan, sehingga dapat menghimpun keseluruhan penyuluh yang berasal dari departemen kehutanan, Departemen Pertanian dan Departemen Kelautan dan Perikanan. Sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Pelaksanaan sebagai penjabaran dari Undang-undang penyuluhan tersebut maka bayangan Struktur organisasi penyuluhan kemungkinan besar wujudnya adalah merupakan suatu Badan yang setingkat dengan eselon II yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang dilengkapi dengan kabag Tata usaha setingkat eselon III yang membawahi sub bagian umum dan keuangan dan sub bagian program dan kepegawaian, kemudian pada tataran eselon III lainnya ditempatkan tiga bidang yakni bidang penyuluhan pertanian, bidang penyuluhan kehutanan dan bidang penyuluhan perikanan, selanjutnya organ lain pada jenjang yang lebih rendah adalah BPP yang merupakan wadah penyuluh pertanian ditingkat kecamatan. Apabila asumsi organisasi tersebut terlaksana maka hal yang pasti terjadi adalah pelayanan penyuluhan terhadap petani tidak lagi terkotak-kotak dan tidak akan ada lagi sifat ego sektor diantara penyuluh pertanian. Bagan struktur organisasi yang dimaksud seperti dikemukakan pada Gambar 8

Gambar 8. Pilihan Bagan Strukur Organisasi Badan/Kantor Penyuluhan Pertanian, Kehutanan ,dan Perikanan



2. Variabel Sumber Daya

Komponen pengukuran variabel Sumber daya terdiri atas empat sub komponen yakni SDM Penyuluh, Finansial, Teknologi dan Sarana Penyuluhan. Jumlah pernyataan yang terkandung didalamnya sebanyak 13 buah, dengan demikian skor maksimal yang mungkin dicapai untuk setiap responden pada variabel Sumber daya adalah 65

Pernyataan yang terkandung dalam sub komponen SDM adalah

- 1) Tingkat pendidikan yang dimiliki penyuluh, dapat menunjang tugas pokok dan fungsi penyuluh. Pernyataan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pendidikan formal yang dimiliki penyuluh berperan dalam mendukung kegiatan penyuluhan yang dilakukannya, hal tersebut cukup beralasan karena diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang akan semakin menunjang tugas pokok dan fungsi penyuluh yang bersangkutan;
- 2) Kemampuan menganalisis penggunaan pupuk / satuan luas, pernyataan tersebut dikemukakan karena berdasarkan fakta dilapangan penyampaian informasi tentang penggunaan pupuk oleh penyuluh kepada petani umumnya selalu merujuk pada satuan luas lahan / ha, dalam keadaan demikian kemungkinan petani akan sulit mengetahui dengan pasti kebutuhan pupuk berdasarkan luas lahan rill yang dimilikinya, karena lahan yang dimiliki petani bisa lebih kecil atau lebih besar dari 1,0 ha. Atas dasar itulah kemampuan penyuluh menganalisis kebutuhan pupuk dapat diukur dengan menggunakan piranti

kuis yang diberikan kepada responden. 3) Kemampuan menganalisis pendapatan usahatani, Pernyataan tersebut dimasukkan sebagai bagian dari komponen SDM karena salah satu tujuan penyuluhan adalah petani diharapkan mampu menghitung sendiri pendapatan usahatannya, atas dasar itulah sebelum petani mampu menghitung pendapatan usahatannya, maka seorang penyuluh terlebih dahulu harus menguasai dan mampu menganalisis pendapatan usahatani. 4) Pernyataan kemampuan penguasaan teknologi komoditas pertanian utama. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana penyuluh yang menjadi responden menguasai dan mengetahui teknik budidaya komoditas pertanian utama yakni padi dan palawija; 5) Pelatihan teknologi yang pernah diikuti oleh penyuluh, Pernyataan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui frekuensi pelatihan teknologi pertanian yang pernah diikuti, baik ditingkat kabupaten maupun ditingkat provinsi

Pernyataan yang terkandung didalam sub komponen Finansial terdiri dari empat pernyataan yakni; 1) Dukungan anggaran untuk membiayai operasional penyuluhan; 2) Dukungan anggaran untuk membiayai kegiatan percontohan, demplot dan kaji terap; 3) Dukungan anggaran untuk membiayai kegiatan pembuatan media cetak berupa leaflet dan brosure, dan ; 4) Dukungan anggaran untuk membiayai kegiatan kunjungan, anjagsana ke kelompok tani, pelatihan dan kursus tani. Maksud dikemukakannya pernyataan tersebut adalah untuk

mengetahui seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kegiatan yang dimaksud.

Pernyataan yang terkandung didalam sub komponen Teknologi terdiri dari dua aspek yaitu ; 1) Kecukupan alat bantu penyuluhan yang digunakan oleh penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, dan ; 2) Peralatan dan bahan penyuluhan yang digunakan. Tujuan dari pernyataan tersebut adalah untuk mengetahui apakah alat bantu dan peralatan yang digunakan sudah sesuai kebutuhan. Alat bantu dan bahan penyuluhan yang dimaksud antara lain adalah alat peraga berupa Flip chart, Soil tester, kertas lakmus, OHP projector, Megaphone, Kompas, Slide projector, dan sebagainya.

Selanjutnya pernyataan yang terkandung dalam sub komponen Sarana penyuluhan adalah; 1) Pemanfaatan Kantor BPP, maksud pernyataan tersebut adalah untuk mengetahui apakah Kantor BPP berikut lahan percontohan yang dimiliki sudah dimanfaatkan berdasarkan peruntukannya dan; 2) Kendaraan dinas roda dua yang dimiliki oleh penyuluh. Maksud dikemukakannya pernyataan tersebut adalah untuk mengetahui apakah penyuluh dalam melaksanakan tugasnya sudah didukung oleh kendaraan roda dua mengingat kondisi wilayah kerja penyuluh pertanian di kabupaten Tana Toraja mengharuskan seorang penyuluh memiliki alat transportasi tersebut.

Adapun hasil tanggapan responden terhadap variabel Sumber daya adalah seperti terlihat pada Tabel 3

Tabel 3. Tanggapan Responden terhadap Variabel Sumber daya(X2)

Pernyataan	Bobot	Frekuensi	Skor Bobot x Frek	%
BS	5	14	70	3,58
B	4	90	360	18,46
S	3	176	528	27,07
K	2	81	162	8,30
Ks	1	29	29	3,33
			1149	58,91

Sumber : Hasil olah data primer Des. 2006

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa responden yang memilih pernyataan pada masing-masing kriteria diuraikan sebagai berikut:

1) Kriteria sangat baik (SB) dipilih oleh 8 responden dengan jumlah frekuensi sebanyak 14. Bila jumlah frekuensi tersebut dikalikan dengan bobot pernyataan maka skor yang dicapai adalah 70 setara dengan 3,58 % ; 2) Kriteria baik (B) dipilih oleh 27 responden dengan jumlah frekuensi sebanyak 90, apabila jumlah frekuensi tersebut dikalikan dengan bobot pernyataan maka jumlah skornya adalah 360 atau setara dengan 18,46 %; 3) Kriteria sedang (S) dipilih oleh 30 responden dengan jumlah frekuensi sebanyak 176, apabila jumlah frekuensi tersebut dikalikan dengan bobot pernyataan maka jumlah skornya adalah 528 atau 27,38 %; 4) Kriteria kurang (K) dipilih oleh 29 responden dengan jumlah frekuensi sebanyak 81, jika jumlah tersebut dikalikan dengan bobot pernyataan maka jumlah skornya adalah 162 atau 8,30 % dan :

5) Pada kriteria kurang sekali (KS) dipilih oleh 24 responden dengan jumlah frekuensi sebanyak 29, jika jumlah tersebut dikalikan dengan bobot pernyataan maka jumlah skornya adalah 29 atau 1,43 %. Dengan demikian skor rata-rata pilihan responden terhadap variabel Sumber daya adalah 58,91 % dengan kata lain interpretasi nresponden pada variabel Sumber daya (X2) terhadap kinerja penyuluh pertanian adalah **Sedang**

Berdasarkan uraian tersebut memperlihatkan bahwa peran Sumber daya yang terdiri dari aspek SDM, financial , teknologi ,dan sarana penyuluhan masih perlu ditingkatkan .Dari ke empat aspek tersebut yang perlu mendapat perhatian adalah aspek financial yang digunakan untuk mendukung operasional penyuluhan, kegiatan percontohan/ demplot/ kaji terap, pembuatan media cetak penyuluhan berupa leaflet, brosur atau liptan serta anggaran untuk kegiatan kunjungan, latihan, anjongsana dan kursus-kursus tani. Hal tersebut cukup beralasan karena dukungan anggaran APBD II dan APBN yang dapat menggerakkan kegiatan penyuluhan selama ini terasa masih kurang dan belum memadai

Berikut ini dikemukakan alokasi anggaran penyuluhan periode Tahun Anggaran 2001 – 2006 pada Tabel 4

Tabel 4. Alokasi Anggaran Penyuluhan dari Tahun 2001 – 2006

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp) (000)					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	APBD II	1.084.999	124.900	139.861	150.000	112.500	342.000
2	APBN	1.325.273	996.584	2.361.695	3.253.839	1.948.832	5.768.000
3	BLN	11.740	-	-	-	-	-
4	Total Anggaran Dinas	2.422.012	1.091.484	2.501.556	3.383.839	2.061.332	6.092.000
5	Anggaran Penyuluh	193.740	219.000	141.150	224.930	250.000	1.025.700
6	% Anggaran Penyuluhan terhadap Anggaran Dinas	7,99	20,06	5,64	6,64	12,12	16,83

Sumber : Data Dinas Pertanian dan Pangan 2006

Berdasarkan alokasi anggaran pada Tabel 3 tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata alokasi anggaran untuk Penyuluh pertanian dari tahun ketahun kelihatnnya cukup memadai , namun bila dikaitkan dengan pemanfatan anggaran yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan petani , antara lain berupa demplot, percontohan, pelatihan petani, sekolah lapang, brosur, liptan serta kaji terap porsinya justru masih kurang. Berikut ini dikemukakan perbandingan anggaran penyuluhan dengan porsi anggaran untuk kegiatan penyuluhan yang langsung dibutuhkan petani berupa metode dan media penyuluhan pada Tabel 5

Tabel 5. Perbandingan Anggaran Penyuluhan dengan Alokasi Anggaran Penyuluhan yang langsung dibutuhkan petani berupa untuk Media /Metode Penyuluhan dan Pelatihan/Kursus Tani

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp) (000)					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Total Anggaran Penyuluh	193.740	219.000	141.150	224.930	250.000	1.025.700
2	Demplot,Percontohan,Kaji terap,Media Cetak,Pelatihan dan Kursus Tani	11.714	12.505	21.441	25.000	29.000	49.500
3	Anggaran Penyuluhan tidak langsung	182.026	206.495	119.709	199.930	221.000	976.200
4	% tase Terhadap total anggaran Penyuluh	6,04	5,71	15,19	11,11	11,16	4,82
5	% tase Terhadap total anggaran Dinas Pertanian	0,48	1,14	0,85	0,07	1,40	0,08

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab Tana Toraja Tahun 2006

Berdasarkan Tabel 5 tersebut memperlihatkan bahwa aspek financial yang mendukung kegiatan penyuluh pertanian sangat kurang dibanding dengan anggaran yang ada , oleh karena itulah kedepan anggaran untuk kegiatan penyuluhan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan petani perlu diperhatikan. Hal tersebut sejalan dengan pula dengan hasil evaluasi Bank Dunia dalam Sumodiningrat (2000) yang menyatakan bahwa biaya penyuluhan pertanian adalah sangat penting dan dianjurkan.

Walaupun demikian, dukungan anggaran untuk kegiatan penyuluhan tersebut dianggap penting, tapi bukanlah hal yang mutlak ,

karena sesungguhnya tunjangan jabatan fungsional yang dimiliki penyuluh pertanian dan anggaran penyuluhan tidak langsung lainnya berupa biaya operasional penyuluhan (BOP) mengharuskan mereka menjalankan tupoksinya secara rutinitas, seperti halnya dengan jabatan fungsional lainnya yang diimbun oleh kalangan guru dan dosen.

Persoalannya memang selama ini telah terjadi proses menina bobokkan atau memanjakan penyuluh pertanian, karena sejak awal pengangkatannya mereka telah diberi tugas sebagai pendamping pada kegiatan-kegiatan keproyekan yang cukup banyak memberikan dukungan financial misalnya dalam bentuk uang perjalanan tetap, uang kerja bimbingan serta honorarium lainnya yang melekat pada proyek-proyek tersebut, sehingga lambat laun tercipta image dalam diri penyuluh seolah-olah kegiatan keproyekan adalah tugas pokok mereka. Akibatnya dikemudian hari terutama sejak era otonomi daerah, ketika dukungan financial pada kegiatan penyuluhan pertanian tidak lagi terpenuhi, merekapun merasa tugas pokok dan fungsinya tidak diperhatikan lagi, padahal sesungguhnya kegiatan proyek tersebut pada dasarnya hanyalah pelengkap dari tugas pokok dan fungsi yang harus diembannya.

Memang tidak dipungkiri bahwa dengan adanya kegiatan keproyekan akan memperlancar atau memudahkan kegiatan penyuluhan, akan tetapi hal tersebut bukanlah suatu keharusan, dalam arti kata bahwa kegiatan penyuluhan tidak harus menggunakan biaya dari pemerintah

karena sesungguhnya biaya penyuluhan itu bisa berasal dari kelompok tani itu sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dari penuturan salah seorang informan yang selalu membuat percontohan/demplot dan uji coba swadana. Penuturannya sebagai berikut:

AR 53 [S]ebenarnya kalau penyuluh mau berbuat, kami kelompok tani dapat membiayai sendiri percontohan-percontohan atau demplot atau kegiatan penyuluhan lainnya meskipun jumlahnya tidak banyak, dan tidak harus menggunakan anggaran pemerintah, yang penting penyuluh rajin mengadakan pendekatan terhadap petani.

Berdasarkan pernyataan tersebut sudah seharusnya para penyuluh dapat mengubah image ketergantungan pada anggaran proyek pemerintah semata menjadi kegiatan yang sifatnya rutin. Hal tersebut seperti pernyataan Sumodiningrat (2000) bahwa, lebih banyaknya kegiatan proyek daripada kegiatan rutin, menandakan bahwa pengelolaan pembangunan pertanian belum berkembang. Oleh karena itulah para penyuluh diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sikap pelayanannya (stewardship) untuk memenuhi kebutuhan petani

3. Variabel Aturan dan Prosedur Kerja (X3)

Komponen pengukuran variabel aturan dan prosedur kerja terdiri atas 5 sub komponen yakni 1) Persiapan Penyuluhan Lapangan; 2) Pelaksanaan Penyuluhan; 3) Evaluasi dan Pelaporan; 4) Pengembangan penyuluhan pertanian; dan 5) Pengembangan profesi. Jumlah pernyataan yang terkandung didalamnya sebanyak 30 buah dengan demikian peluang skor maksimal yang dapat dipenuhi oleh responden adalah 150.

Sub komponen Persiapan Penyuluhan Lapangan terdiri dari tiga bagian yakni: a) Identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi pertanian, jumlah pernyataan yang terkandung didalamnya adalah : 1) Menyusun instrumen pengumpulan data potensi wilayah agroekosistem; 2) Menganalisis data potensi wilayah agroekosistem, kedua pernyataan tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah penyuluh yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem berdasarkan pedoman pelaksanaan yang ada; b) Menyusun Program Penyuluhan Pertanian. Jumlah pernyataan yang ada didalamnya adalah: 1) Menyusun konsep program penyuluhan pertanian; 2) Mendiskusikan konsep-konsep program penyuluhan pertanian; 3) Merumuskan konsep Program penyuluhan pertanian hasil diskusi. Dikemukakannya pernyataan - pernyataan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh penyuluh tersebut melaksanakan pekerjaan tersebut. c) Penyusunan Rencana kerja Penyuluhan Pertanian. Pernyataan yang ada pada bagian tersebut hanya ada satu yakni menyusun rencana kerja tahunan, maksud dari pernyataan tersebut adalah untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang direncanakan oleh penyuluh bersangkutan dalam kurun waktu setahun.

Keseluruhan komponen persiapan penyuluhan lapangan tersebut akan terlihat jelas pada arsip-arsip dokumen yang dimiliki oleh penyuluh bersangkutan.

Selanjutnya pada Sub komponen Pelaksanaan Penyuluhan pertanian terdiri dari tiga bagian yaitu; a) Penyusunan materi penyuluhan pertanian yang mengandung dua pernyataan yakni 1) Menyiapkan bahan untuk penyusunan materi penyuluhan; 2) Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk media cetak berupa leaflet/ folder/ liptan atau poster. Persepsi dari pernyataan tersebut adalah untuk mengukur sejauh mana kemampuan penyuluh menyediakan materi penyuluhan berupa konsep ataupun bahan penyuluhan dalam bentuk media cetak, b) Penerapan metode penyuluhan terdiri dari lima pernyataan sebagai berikut: 1) Melakukan kunjungan tatap muka/ anjagsana pada petani; 2) Melakukan kunjungan /tatap muka pada kelompok tani. persepsi dari kedua pernyataan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan antara rencana dan realisasi kunjungan tatap muka atau anjagsana yang dilakukan penyuluh baik terhadap individu petani maupun terhadap kelompok tani; 3) Merencanakan uji coba lapang paket teknologi spesifik lokasi, maksud dari pernyataan tersebut adalah untuk mengetahui apakah penyuluh bersangkutan merencanakan dan melaksanakan kegiatan dimaksud, sebagai salah satu bentuk dari metode penyuluhan yang diharapkan mudah diadopsi oleh petani; 4) Menyusun materi/ modul kursus tani, pengertian dari pernyataan tersebut dikandung maksud untuk mengukur kemampuan penyuluh dalam melakukan kegiatan tersebut, karena kursus tani diharapkan berhasil baik bila didukung oleh persiapan materi dalam bentuk modul yang cukup; 5) Melakukan penyuluhan

massal pada pertemuan masyarakat petani, tujuan dari pernyataan tersebut adalah untuk mengetahui perbandingan frekuensi antara rencana dan realisasi dari kegiatan penyuluhan dalam bentuk pertemuan massal. c) Pengembangan swadaya dan swakarya petani. Kegiatan tersebut terdiri dari empat pernyataan yakni : 1) Menumbuhkan koperasi petani; 2) Menumbuhkan kemitraan usaha; 3) Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok tani dan ; 4) Berperan serta dalam perlombaan pertanian. Pemahaman mengenai pernyataan-pernyataan tersebut adalah untuk mengukur seberapa jauh peran penyuluh pertanian terhadap pengembangan swadaya dan swakarya petani.

Sub komponen Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan penilaian dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian. Pernyataan yang dimaksud adalah ; 1) Menyusun rencana kegiatan evaluasi; 2) Mengumpulkan data hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian; 3) Menganalisis dan menyusun laporan penyuluhan pertanian; 4) Mendiskusikan hasil evaluasi penyuluhan pertanian dan; 5) Merumuskan laporan hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian. Keseluruhan dari pernyataan tersebut pada dasarnya adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh penyuluh untuk mengukur sejauh mana hasil pelaksanaan penyuluhan yang telah dicapai dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi kegiatan penyuluhan.

Sub komponen Pengembangan Penyuluhan Pertanian pada dasarnya merupakan kegiatan yang berkaitan dengan a) Penyusunan pedoman penyuluhan pertanian yang terdiri dari tiga pernyataan yaitu 1) Pengumpulan data; 2) Pengolahan dan analisis data dan; 3) Menyusun konsep pedoman penyuluhan pertanian. b) Penyusunan / petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyuluhan pertanian yang bermula dari 1) Kegiatan pengumpulan data; 2) Pengolahan dan analisis data; 3) Menyusun Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Tujuan dari sub komponen tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana peran penyuluh dalam aktivitas pengembangan penyuluhan pertanian yang bermula dari pengumpulan data, pengolahan data dan akhirnya menyusun konsep penyuluhan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyuluhan pertanian

Sub komponen terakhir yang menjadi bagian dari variabel (X3) tersebut adalah Pengembangan profesi. yang mengandung pernyataan 1) melakukan kegiatan karya tulis dan karya ilmiah dibidang penyuluhan pertanian yang dipublikasikan di media massa maksud dikemukakannya pernyataan tersebut adalah untuk mengukur apakah seorang penyuluh telah melaksanakan kegiatan karya tulis sebagai salah satu bagian dari tugas pokok dan fungsinya dan 2) pernyataan membimbing penyuluh pertanian di bawah jenjang jabatannya. Tujuan dari pernyataan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah penyuluh bersangkutan

senantiasa melakukan kerjasama dan tukar menukar informasi yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan.

Adapun hasil tanggapan responden pada variabel Aturan dan Prosedur Kerja (X3) dikemukakan pada Tabel 6

Tabel 6. Tanggapan Responden terhadap Variabel Aturan dan Prosedur Kerja (X3)

Pernyataan	Bobot	Frekuensi	Skor Bobot x Frek	%
SB	5	37	185	4,11
B	4	220	880	19,55
S	3	447	1341	28,80
K	2	153	306	6,80
Ks	1	43	43	0,95
			2755	61,22

Sumber : Hasil olah data primer sponden Des. 2006

Berdasarkan Tabel tersebut memberi gambaran bahwa responden yang memilih pernyataan pada masing-masing kriteria diuraikan sebagai berikut: 1) Kriteria sangat baik (SB) dipilih oleh 12 responden dengan jumlah frekuensi sebanyak 37. apabila jumlah frekuensi tersebut dikalikan dengan bobot pernyataan maka skor yang dicapai adalah 185 setara dengan 4,11 % ; 2) Kriteria baik (B) dipilih oleh 30 responden dengan jumlah frekuensi sebanyak 220 , apabila jumlah frekuensi tersebut dikalikan dengan bobot pernyataan maka jumlah skornya adalah 880 atau setara dengan 19,55 %; 3) Kriteria sedang (S) dipilih oleh 30 responden dengan jumlah frekuensi sebanyak 447, apabila

jumlah frekuensi tersebut dikalikan dengan bobot pernyataan maka jumlah skornya adalah 1341 atau 28,80 %; 4) Kriteria kurang (K) dipilih oleh 29 responden dengan jumlah frekuensi sebanyak 153, jika jumlah tersebut dikalikan dengan bobot pernyataan maka jumlah skornya adalah 306 atau 6,80 % dan : 5) Pada kriteria kurang sekali (KS) dipilih oleh 26 responden dengan jumlah frekuensi sebanyak 43, jika jumlah tersebut dikalikan dengan bobot pernyataan maka jumlah skornya adalah 43 atau 0,95 %. Dengan demikian skor rata-rata pilihan responden terhadap variabel aturan dan prosedur kerja sebesar 61,22 % dengan kata lain interpretasi responden terhadap variabel aturan dan prosedur kerja terhadap kinerja penyuluh adalah **Baik**.

Uraian tersebut memberi indikasi bahwa aturan dan prosedur kerja telah dilaksanakan dengan baik oleh penyuluh. Hal tersebut cukup beralasan karena umumnya para penyuluh pertanian di daerah ini telah melaksanakan tugas cukup lama berpengalaman dan telah memahami tupoksinya secara mendalam, walaupun demikian pencapaian kriteria yang **baik** tersebut masih dapat ditingkatkan kearah yang lebih baik lagi, karena ternyata masih ada komponen- komponen dalam aturan dan prosedur kerja yang kurang dilakukan oleh penyuluh, terutama aspek pengembangan profesi penyuluhan.

Terhadap kondisi tersebut bila ditanyakan kepada penyuluh “mengapa aspek pengembangan penyuluhan pertanian dan

pengembangan profesi kurang diperhatikan” maka dijawab (salah satu dari mereka) sebagai berikut:

SDR, 44 [A]spek pengembangan profesi agak sulit dilakukan oleh penyuluh karena kemampuan penyuluh untuk melaksanakan kegiatan tersebut rata-rata masih kurang, hal tersebut terjadi karena pelatihan kegiatan tersebut tidak pernah dilakukan ,lagi pula nilai kredit point untuk kenaikan pangkat penyuluh bukan unsur pokok melainkan hanya merupakan unsur penunjang.

Atas dasar pernyataan tersebut maka komponen pengembangan profesi penyuluhan perlu mendapat perhatian, meskipun perannya didalam kredit point hanya merupakan unsur penunjang

4. Variabel Kinerja Penyuluh (Y)

Komponen pengukuran variabel Kinerja Penyuluh terdiri atas 4 sub komponen yakni a) Pembinaan Petani mengandung pernyataan sebagai berikut; 1) Kelengkapan tentang kegiatan usahatani diwilayah kerja penyuluh yang dimiliki kelompok tani; 2) Kelengkapan data tentang kebijakan pemerintah; 3) Kelengkapan data dan bahan informasi mengenai teknologi yang dimiliki kelompok tani binaan penyuluh; 4) Peningkatan jenjang kelas kelompok tani; 5) Jumlah anggota kelompok tani yang menjadi pengurus dan anggota koperasi; 6) Penghargaan yang pernah diperoleh kelompok tani; 7) Rencana kerja kelompok tani; 8) Perkembangan pelunasan kredit; 9) Perkembangan pengelolaan keuangan kelompok tani. Pernyataan - pernyataan tersebut pada dasarnya adalah parameter untuk mengetahui sejauh mana hasil kegiatan pembinaan petani yang dilakukan oleh penyuluh bersangkutan,

cara mengukur pernyataan – pernyataan tersebut adalah dengan membandingkan kelengkapan data yang telah dipunyai dengan apa yang seharusnya dipenuhi oleh suatu kelompok, membandingkan kelas kelompok tani yang ada di wilayah kerja penyuluh bersangkutan dan jumlah anggota kelompok yang menjadi pengurus dan anggota koperasi , membandingkan rencana kerja dengan realisasi kerja, menilai administrasi pengelolaan keuangan kelompok dan perkembangan pelunasan kredit. b) Penerapan Teknologi. Jumlah pernyataan terdiri dari: 1) Rata – rata persentase penerapan teknologi. Pernyataan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penggunaan pupuk yang diukur dari jumlah penggunaan pupuk dan teknik budi daya yang sesuai anjuran; 2) Jumlah petani yang menerapkan teknologi pada komoditas utama, dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana petani telah menerapkan teknologi, cara mengukur pernyataan tersebut adalah dengan membandingkan persentase antara jumlah petani yang menerapkan teknologi dengan jumlah anggota kelompok tani setempat; 3) Persentase petani menerapkan pola tanam, pernyataan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui jumlah petani yang melaksanakan jadual tanam sesuai rencana, dengan cara membandingkan jumlah petani yang menerapkan pola tanam diantara mereka dalam kurun waktu tertentu

c) Produktivitas Komoditras Pertanian di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian, pernyataan tersebut adalah untuk mengukur sejauh mana pencapaian produktivitas komoditas padi dan palawija dalam satuan

kuantitas / luas lahan, cara mengukurnya adalah membandingkan hasil riil yang dicapai petani dengan peluang potensi hasil yang dihasilkan pada percobaan di wilayah kerja tersebut; d) Hubungan kerja sama dengan lembaga terkait dan peranan dalam kegiatan sosial masyarakat, pernyataan yang terkandung didalamnya adalah; 1) Peran serta dalam organisasi profesi; 2) Peran serta dalam penyuluhan KUD; 3) Peran serta dalam penyuluhan keagamaan; 4) Peran serta dalam pembinaan lingkungan hidup dan; 5) Peran serta dalam kegiatan diversifikasi pangan dan gizi, maksud dari pernyataan tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana kelompok tani binaan penyuluh pertanian tersebut mampu melaksanakan kegiatan tersebut , cara pengukuran dari pernyataan tersebut adalah dengan cara membandingkan frekuensi kegiatan tersebut diantara sesama anggota kelompok tani .

Jumlah pernyataan yang terkandung didalam variabel tersebut sebanyak 19 buah dengan demikian skor maksimal untuk variabel kinerja penyuluh adalah 95 untuk setiap responden.

Adapun hasil tanggapan responden yang diperkuat dengan tanggapan informan pada variabel Kinerja Penyuluh (Y) disajikan pada Tabel 7

Tabel 7. Tanggapan Responden dan Informan terhadap Variabel Kinerja Penyuluh (Y)

Pernyataan	Bobot	Frekuensi	Skor Bobot x Frek	%
BS	5	2	10	0,35
B	4	111	444	15,57
S	3	350	1050	36,84
K	2	101	202	7,08
Ks	1	4	4	0,14
			1710	59,90

Sumber : Hasil olah data primer Des.2006

Berdasarkan Tabel tersebut dapat diketahui bahwa responden yang memilih pernyataan pada masing-masing kriteria diuraikan sebagai berikut: 1) Kriteria sangat baik (SB) dipilih oleh 2 responden dengan jumlah frekuensi sebanyak 2. apabila jumlah frekuensi tersebut dikalikan dengan bobot pernyataan maka skor yang dicapai adalah 10 setara dengan 0,35 %; 2) Kriteria baik (B) dipilih oleh 30 responden dengan jumlah frekuensi sebanyak 111 , apabila jumlah frekuensi tersebut dikalikan dengan bobot pernyataan maka jumlah skornya adalah 444 atau setara dengan 15,57 %; 3) Kriteria sedang (S) dipilih oleh 30 responden dengan jumlah frekuensi sebanyak 350, apabila jumlah frekuensi tersebut dikalikan dengan bobot pernyataan maka jumlah skornya adalah 1050 atau 36,84 %; 4) Kriteria kurang (K) dipilih oleh 27 responden dengan jumlah frekuensi sebanyak 101, jika jumlah tersebut

dikalikan dengan bobot pernyataan maka jumlah skornya adalah 202 atau 7,08 % dan : 5) Pada kriteria kurang sekali (KS) dipilih oleh 2 responden dengan jumlah frekuensi sebanyak 4, jika jumlah tersebut dikalikan dengan bobot pernyataan maka jumlah skornya adalah 4 atau 0,14 %. Dengan demikian skor rata-rata pilihan responden terhadap variabel Kinerja Penyuluh (Y) adalah 59,90 % dengan kata lain interpretasi terhadap variabel Kinerja penyuluh adalah **Sedang**

Apabila hasil data kuantitatif (59,90 %) tersebut diterjemahkan kedalam skala kualitatif maka dapat dimaknai bahwa kriteria pencapaian kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Tana Toraja pada saat penelitian dilaksanakan baru pada`tahap **Sedang**, artinya apa yang dicapai tersebut belum optimal karena masih ada dua tahap jenjang kriteria di atasnya

Pencapaian kinerja penyuluh dalam kategori sedang tersebut memberi isyarat bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi . Dari ke tiga variabel bebas yang digunakan untuk mengukur kinerja penyuluh tersebut tampaknya variabel organisasi (X1) yang perlu mendapat perhatian utama untuk dibenahi karena merupakan faktor yang terlemah bila dibandingkan dengan variabel lainnya

D. Hasil Analisis Berdasarkan Uji Regresi

Untuk mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kinerja penyuluh perlu dibuktikan berdasarkan kaidah - kaidah ilmiah dengan menggunakan analisis uji regresi berganda yang diolah dengan menggunakan program SPSS 12

Berdasarkan analisis tersebut, dengan menggunakan data kuantitatif yang ada, hasilnya memperlihatkan persamaan, yakni

$$Y = 16,833 + (0,126) (x_1) - (0,109) (x_2) + (0,727) (x_3) + E$$

Hasil analisis terhadap data variabel organisasi (X_1) menunjukkan besarnya kontribusi organisasi terhadap kinerja penyuluh (Y) sebesar 0,126, kuantifikasi ini bermakna bahwa setiap 1 unit paduan kegiatan organisasi memberikan kontribusi terhadap kinerja penyuluh sebesar 0,126.

Kemudian hasil analisis terhadap Variabel Sumberdaya (x_2) menunjukkan besarnya kontribusi sumberdaya terhadap kinerja penyuluh (Y) sebesar $- 0,109$. angka minus tersebut bukan berarti bahwa dengan meningkatkan sumberdaya akan menurunkan kinerja penyuluh, akan tetapi hal ini disebabkan oleh adanya komponen sumberdaya yang dijadikan parameter penilaian kinerja walaupun tidak dipenuhi, kegiatan penyuluhan akan terlaksana dengan baik, misalnya aspek teknologi yang terdiri dari alat bantu penyuluhan dan peralatan penyuluhan yang digunakan seperti flip chart, soil tester, Over head proyektor, megaphone, kompas, slide proyektor dan sebagainya

Selanjutnya hasil analisis terhadap variabel aturan dan prosedur kerja (x_3) pada Lampiran 7 menunjukkan besarnya kontribusi aturan dan prosedur kerja terhadap kinerja penyuluh (Y) memberi kontribusi sebesar 0,727. Hasil ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat bahwa aturan dan prosedur kerja dilaksanakan dengan baik oleh penyuluh

Selanjutnya bila dilihat hubungan antara variabel kinerja (Y) dengan variabel x_1 , x_2 , x_3 secara bersama-sama memperlihatkan angka sebesar $R = 0,766$, sedangkan koefisien determinasi R^2 memperlihatkan angka sebesar 0,58,7 ini berarti bahwa peubah variabel (Y) disebabkan oleh variabel x_1 , x_2 , x_3 secara bersama-sama sebesar 58,7 % , dimana sisanya sebesar $100 \% - 58,7 \% = 42,3 \%$ disebabkan oleh faktor lain

Berdasarkan temuan tersebut diatas maka hanya sebagian dari komponen hipotesis diterima

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Analisis deskriptif menjelaskan bahwa keragaan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten Tana Toraja yang terdiri dari komponen organisasi, sumberdaya serta aturan dan prosedur kerja ditanggapi berbeda satu sama lain oleh responden. Untuk variabel organisasi termasuk dalam kategori kurang, untuk variabel sumberdaya ditanggapi dengan kategori sedang, serta aturan dan prosedur kerja ditanggapi dengan kategori baik. sementara kinerja penyuluh yang dicapai adalah dalam kategori sedang. Hasil analisis tersebut mengisyaratkan bahwa keragaan kelembagaan penyuluh pertanian di kabupaten Tana Toraja masih perlu ditingkatkan terutama pada aspek organisasi penyuluh, Hal tersebut cukup beralasan karena Dinas Pertanian dan Pangan yang mewadahi penyuluh pertanian saat ini tidak sepenuhnya mencakup sub sektor yang menjadi tugas pokok dan fungsi penyuluh, dalam hal ini sektor hortikultura dan perkebunan berada pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dengan demikian komoditas hortikultura dan perkebunan terlepas dari penanganan

penyuluh pertanian. Jadi inti dari pemecahan masalah keragaan kelembagaan penyuluh pertanian dikabupaten Tana Toraja adalah menggabungkan seluruh aspek yang menjadi ruang lingkup tugas pokok dan fungsi penyuluh kedalam satu wadah organisasi , apapun bentuknya

2. Hasil analisis uji regresi memperlihatkan bahwa kontribusi variabel organisasi (x1) terhadap kinerja (Y) sebesar 12,6 %, kontribusi Sumberdaya (x2) terhadap kinerja (Y) memberi penurunan kontribusi kinerja sebesar 10,9 %. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ada komponen variabel sumberdaya yang tidak perlu dipenuhi, karena penyuluh dapat melaksanakan kegiatannya meskipun tanpa komponen tersebut, selanjutnya kontribusi aturan dan prosedur kerja (x3) terhadap kinerja (Y) memberi kontribusisebesar 72,7 %, Hasil ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat bahwa aturan dan prosedur kerja dilaksanakan dengan baik oleh penyuluh

Selanjutnya bila dilihat hubungan antara variabel kinerja (Y) dengan variabel x1, x2, x3 secara bersama-sama memperlihatkan angka sebesar $R = 0,766$, sedangkan koefisien determinasi R^2 memperlihatkan angka sebesar 0,58,7 ini berarti bahwa peubah variabel (Y) disebabkan oleh variabel x1, x2, x3 secara bersama-sama sebesar 58,7 % , dimana sisanya sebesar $100 \% - 58,7 \% = 42,3 \%$ disebabkan oleh faktor lain

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka ada beberapa hal yang dapat disarankan untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian di kabupaten Tana Toraja antara lain :

1. Organisasi yang mewadahi Penyuluh Pertanian di kabupaten Tana Toraja sebaiknya berdiri sendiri agar dapat melayani seluruh sub sektor pertanian sehingga tidak ada lagi perbedaan dan pengkotakan pelayanan penyuluh terhadap petani yang mengusahakan komoditas pertanian yang berbeda
2. Apabila organisasi yang mewadahi penyuluh tidak dapat dibentuk, maka alternatif lain yang disarankan adalah menggabungkan Sub Dinas Hortikultura dan Sub Dinas Perkebunan kedalam wadah Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan
3. Jika seandainya alternatif kedua tersebut juga tidak dapat dilakukan maka pilihan lain adalah menambahkan Sub Dinas Penyuluhan pada Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Tana Toraja.
4. Apapun bentuk organisasi yang mewadahi penyuluh, hal yang juga penting dilakukan adalah meningkatkan koordinasi pemanfaatan penyuluh pertanian antara Dinas Pertanian dan Pangan dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tana Toraja

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Tulus, Muhammad, 1995. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta . 8 & 9
- Ibrahim, Jabal Tarik dkk, 2003. *Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian*. Bayumedia Publishing UMM Press Jawa Timur
- Kleinbaun,D.G. dan Kupper,L.L., 1978 *Aplied Reression Alalysis and Other Multivariable Method*. The University of North Carolina at Chapel Hill Duxbury Press, North Scituate, massachuset
- Lembaga Administrasi Negara. 2003 *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta. 15 & 20
- Mosher,A.T. 1987. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*, CV. Yasaguna. Jakarta. 79 & 157
- Pusat Penyuluhan Pertanian. 1999. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Penyuluhan Pertanian*. Departemen Pertanian Jakarta . 33, 35, 149 &181.
- _____. 2002. *Capita Selecta dan Pembinaan Kelompok Tani Dalam Intensifikasi Tanaman Pangan*, Departemen Pertanian Jakarta. 45 .
- _____. 2005. *Revitalisasi Pertanian,Perikanan dan Kehutanan (RPPK)*, Departemen Pertanian Jakarta . 14
- Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian. 2006. *Undang-undang Republik Indoesia No. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan* Departemen Pertanian Jakarta. 3.
- Riduwan.2005 . *Sakala Pengukuran Variabel-veriabel Penelitian* Alfabeta. Bandung . 9 & 12
- Sumodiningrat, Gunawan. 2000. *Pembangunan Ekonomi Melalui Pengembangan Pertanian*, PT. Bina Rena Parawira, Jakarta 49,50,75,76,77,117 &120,
- Van der Ban,A.W dan H.S. Hawkins, 1999 *Penyuluhan Pertanian*, Kanisius Anggota IKAPI Yogyakarta. 23
- Wiriaatmadja.S. 1977. *Pokok-Pokok Penyuluhan Pertanian*, PT. Yasaguna Jakarta. 17

Lampiran 1

Kuesioner

Daftar Kuesioner Untuk Responden Penyuluh

I. Identifikasi Responden

- a. No Responden :
 b. Nama Responden :
 c. Alamat :
 d. Pangkat/Golongan :
 e. Tempat Tugas :
 f. Pendidikan :
 g. Lama Bertugas :

II. Pertanyaan

No	Pernyataan	Alternative jawaban				
		SB 5	B 4	S 3	K 2	KS 1
I	Organisasi (X1)					
1.	Keserasian organisasi Dinas Pertanian dan Pangan dengan kebutuhan penyuluh.					
2.	Hubungan kerja penyuluh pertanian dengan subsektor dalam lingkup Dinas Pertanian dan Pangan.					
3.	Hubungan kerja penyuluh pertanian dengan subsektor dalam lingkup subdin perkebunan dan subdin Hartikultura, pada Din as Pertanian dan Perkebunan					
4.	Program dan rencana kerja Organisasi Dinas Pertanian mengakomordinir tupoksi penyuluh pertanian					
5.	Proses perencanaan/ Program kerja dinas Pertanian dan Pangan melibatkan penyuluh pertanian					
6.	Pelaksanaan Program kerja Dinas Pertanian dan Pangan melibatkan penyuluh pertanian					
7.	Proses perencanaan / program kerja subdin perkebunan dan subdin Hartikultura pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan melibatkan penyuluh pertanian					
8.	Pelaksanaan program kerja subdin perkebunan dan subdin Hortikultura pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan melibatkan penyuluh pertanian.					
	SUB JUMLAH (X1)					

II	Sumber Daya (X2) SDM Penyuluh					
1	Tingkat pendidikan yang dimiliki penyuluh, dapat menunjang tupoksi penyuluh.					
2	Kemampuan menganalisis Penggunaan pupuk/ satuan luas..					
3	Kemampuan menganalisis pendapatan usahatani.					
4	Kemampuan Penguasaan Teknologi komoditas pertanian utama.					
5	Pelatihan teknologi yang pernah diikuti					
6	Finansial Dukungan anggaran untuk operasional penyuluhan.					
7	Dukungan Anggaran untuk kegiatan percontohan/demplot/kaji tetap.					
8	Dukungan anggaran untuk pembuatan kaflet/brosur.					
9	Dukungan anggaran untuk kunjungan, anjagsana, pelatihan dan kursus tani.					
10	Tekhnologi. Kecukupan Alat Bantu penyuluhan yang digunakan					
11	Peralatan dan Bahan Penyuluhan yang digunakan					
12	Sarana Penyuluhan Pemanfaatan Kantor BPP					
13	Kendaraan Penyuluh					
	SUB JUMLAH (X2)					

<p>III</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p>	<p>ATURAN DAN PROSEDUR KERJA (X3)</p> <p>PERSIAPAN PENYULUHAN LAPANGAN</p> <p>A. Identifikasi potensi wilayah daagroekosistem serta kebutuhan teknologi pertanian Menyusun instrument pengumpulan data potensi wilayah agroekosistem Menganalisis data potensi wilayah dan Agroekosistem</p> <p>B. Menyusun program penyuluhan pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun konsep programa penyuluhan Pertanian 2. Mendiskusikan konsep-konsep programa Penyuluhan pertanian 3. Merumuskan konsep programa penyuluhan pertanian hasil diskusi <p>C. Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh <p>PELAKSANAAN PENYULUH PERTANIAN</p> <p>A. Penyusunan Materi Penyuluhan Pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan bahan untuk penyusunan materi Penyuluhan. 2. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam Bentuk Media cetak: <ol style="list-style-type: none"> 1) Leaflet/Folder/Liptan ,brosure, poster <p>B. Penerapan Metode Penyuluhan Pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kunjungan tatap muka/ anjagsana pada Petani 2. Melakukan kunjungan tatap muka pada kelompok tani 3. Merencanakan uji coba lapang paket teknologi spesifik lokasi 4. Menyusun materi/ modul kursus tani 5. Melakukan penyuluh an massal pada pertemuan masyarakat petani <p>C. Pengembangan Swadaya dan Swakarya Petani</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan koperasi petani nelayan 2. Menumbuhkan kemitraan usaha 3. Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok tani 4. Berperan serta dalam perlombaan pertanian 					
---	---	--	--	--	--	--

	<p>EVALUASI DAN PELAPORAN</p> <p>A. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian</p> <p>1. Menyusun rencana kegiatan evaluasi</p> <p>2. Mengumpulkan data hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian</p> <p>3. Menganalisis dan menyusun laporan penyuluhan pertanian</p> <p>4. Mendiskusikan hasil evaluasi penyuluhan pertanian</p> <p>5. Merumuskan laporan hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian</p>					
18						
19						
20						
21						
22						
	<p>PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERTANIAN</p> <p>A. Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis Penyuluhan Pertanian</p> <p>1. Menyusun pedoman penyuluhan Pertanian</p> <p>a. Menyiapkan data dan bahan penyusunan pedoman penyuluhan pertanian</p> <p>1) Pengumpulan data</p> <p>2) Pengolahan dan menganalisis data</p> <p>b. Menyusun pedoman penyuluhan pertanian</p> <p>1) Menyusun konsep penyuluhan pertanian</p> <p>2. Menyusun juklak/juknis penyuluhan pertanian</p> <p>a. Menyiapkan data dan bahan penyusunan/ juklak/ juknis penyuluhan pertanian.</p> <p>1) Mengumpulkan data</p> <p>2) Mengolah dan menganalisis data</p> <p>3) Menyusun juklak/juknis</p>					
23						
24						
25						
26						
27						
28	<p>PENGEMBANGAN PROFESI</p> <p>A. Melakukan Kegiatan Karya Tulis/ karya ilmiah di bidang penyuluhan pertanian</p> <p>1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survey/evaluasi dibidang penyuluhan yang dipublikasikan di media massa</p>					
29						
	<p>C. Membimbing penyuluh pertanian di bawah Jenjang Jabatannya</p> <p>Membimbing penyuluh pertanian di bawah Jenjang Jabatannya</p>					
30						
	<p>SUB JUMLAH (x3)</p>					

	KINERJA PENYULUH (Y)					
	A Pembinaan Petani					
1	1. Kelengkapan Data tentang kegiatan Usahatani diwilayah kerja Penyuluh					
2	2. Kelengkapan Data Tentang Kebijakanaksanaan Pemerintah					
3	3. Kelengkapan Catatan/bahan informasi tentang teknologi					
4	4. peningkatan kelas kemampuan kelompok tani					
5	5. Jumlah anggota kelompok tani yang menjadi anggota/pengurus koperasi					
6	6. Penghargaan yang pernah diperoleh Kelompok Tani					
7	7. Rencana Kerja Kelompok Tani					
8	8. Perkembangan pelunasan Kredit					
9	9. Perkembangan Pengelolaan Keuangan Kelompok Tani					
	B Penerapan Teknologi					
10	1. Rata-rata persentase penerapan Teknologi					
11	2. Jumlah petani yang menerapkan teknologi pada komoditas utama					
12	3. Persentase Petani Menerapkan Pola Tanam					
	C Produktivitas Komoditas Pertanian di Wilayah Kerja					
13	1. Rata-Rata Persentase peningkatan produksi komoditas utama yang dominan dibandingkan dengan produktivitas tahun sebelumnya					
14	a. Padi					
	b. Palawija					
	D Hubungan Kerja sama dengan Lembaga Terkait dan Peran sertadalam Kegiatan Sosial/ Kemasyarakatan					
15	1. Peran serta dalam organisasi profesi					
16	2. Peran serta dalam Penyuluhan KUD					
17	3. Peran serta dalam penyuluhan Keagamaan					
18	4. Peran serta dalam Pembinaan Lingkungan hidup					
19	5. Peran serta dalam kegiatan diversifikasi pangan dan gizi					
	JUMLAH (Y)					

Tana Toraja.....
Responden

Lampiran 2

DAFTAR NAMA-NAMA RESPONDEN

No	Nama	Tempat Tugas	Status
1	M. Sakkeri SP	BPP Rindingallo	Koordinator
2	M. Bahman SP	BPP Rindingallo	PPL
3	Biruanda SP	BPP Sa'dan	Koordinator
4	Rita Amd	BPP Sa'dan	PPL
5	Arianto Pagappong SP	BPP To'Karau	Koordinator
6	Yunus Tandilino SP	BPP To'Karau	PPL
7	Ir. Sudarno	BPP Rantepao	Koordinator
8	M. Muhtar SP	BPP Rantepao	PPL
9	Mathius Rombe Amd	BPP Sanggalangi	Koordinator
10	Christina L. Mandila	BPP Sanggalangi	PPL
11	Jordan Kape Sp	BPP Sangalla	Koordinator
12	Theresia Inan Patu	BPP Sangalla	PPL
13	A. Ranteallo SP	BPP Rantetayo	Koordinator
14	Pali Allo SP	BPP Rantetayo	PPL
15	Sapu Pakonglean SP	BPP Makale	Koordinator
16	Bertha Kala Pasola SSt	BPP Makale	PPL
17	Luther S. Paluin Amd	BPP Buntao	Koordinator
18	Alexander SP	BPP Buntao	PPL
19	David Dengen SP	BPP Mengkendek	Koordinator
20	Palla SP	BPP Mengkendek	PPL
21	Liwan R. La'biran SP	BPP Tondon	Koordinator
22	Yohanis Sinda SP	BPP Tondon	PPL
23	Andarias Pata'dungan SP	BPP Saluputti	Koordinator
24	Petrus Sattu Bunna SP	BPP Saluputti	PPL
25	Palullu SSt	BPP Bonggakaradeng	Koordinator
26	Yakobus SSt	BPP Bonggakaradeng	PPL
27	Pius K. Parinding SP	BPP Simbuang	Koordinator
28	Fredit Paembonan SP	BPP Simbuang	PPL
29	Warsito Sp	BPP Bittuang	Koordinator
30	Simon Amd	BPP Bittuang	PPL

Lampiran 3

DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN

No	Nama	Alamat Desa	Status
1	Desse Toding	Buntu Pepasan	Kontak Tani
2	Marthen Sala'	Baruppu	Kontak Tani
3	A..Pongsitanan	Sa'dan Malimbong	Petani
4	Gustav	Balusu	Kontak Tani
5	Paulus Lau	Pangli	Petani
6	S.Liling Sugi	Palangi	Kontak Tani
7	Daud Barung	Saloso	Kontak Tani
8	Simon Kati	Tikala	Kontak Tami
9	Johanis Kalua	Pala Tokke	Petani
10	Herman Sattu	Nonongan	Petani
11	Yan Pasangin	Batualu	Petani
12	Yunus Tandiboro	Rinding daun induk	Kontak Tani
13	Markus Tappi	Madandan	Kontak Tani
14	Paulus Mulang	Marante Timbang	Kontak Tani
15	Junning	Kamali Pentalluan	Kontak Tani
16	Bartho Sapan	Pasang Solo	Petani
17	Sesa Pongkarurung	Patang Penanian	Petani
18	Toding Allo	Buntao	Kontak Tani
19	H.Rahman Kadir	Tengan	Kontak Tani
20	Albertus	Tampo	Petani
21	Yakobus Banne	Tondon	Petani
22	M.D.Lolok	Tondon Matallo	Kontak Tani
23	A.Biringkanae	Rembon	Kontak Tani
24	Julius Sampe	Ulusalu	Petani
25	Jailani Hasibuan	Leda Poton	Kontak Tani
26	Simon Randa	Rano	Kontak Tani
27	M.Randa	Kondodewata	Kontak Tani
28	Tandi Payung	Mappak	Kontak Tani
29	Herman	Masanda	Kontak Tani
30	S.Sombolangi	Bittuang	Petani

Lampiran 6: Hasil Pengolahan Data Uji Regresi dengan Menggunakan Program SPSS 12

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	59.8950	4.87374	30
X1	39.5000	4.61445	30
X2	58.9103	6.86311	30
X3	61.2197	5.80422	30

Correlations

		Y	X1	X2	X3
Pearson Correlation	Y	1.000	.121	.495	.749
	X1	.121	1.000	-.050	-.007
	X2	.495	-.050	1.000	.756
	X3	.749	-.007	.756	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.262	.003	.000
	X1	.262	.	.397	.486
	X2	.003	.397	.	.000
	X3	.000	.486	.000	.
N	Y	30	30	30	30
	X1	30	30	30	30
	X2	30	30	30	30
	X3	30	30	30	30

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X1, X2 ^b	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.766 ^a	.587	.540	3.30652	.587	12.335	3	26	.000	1.381

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	404.586	3	134.862	12.335	.000 ^a
	Residual	284.261	26	10.933		
	Total	688.847	29			

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	16.833	8.442		1.994	.057	-.519	34.186						
	X1	.126	.133	.119	.942	.355	-.149	.400	.121	.182	.119	.995	1.005	
	X2	-.109	.137	-.153	-.796	.433	-.390	.173	.495	-.154	-.100	.427	2.342	
	X3	.727	.162	.866	4.497	.000	.395	1.060	.749	.661	.567	.428	2.337	

a. Dependent Variable: Y

Coefficient Correlations^a

Model			X3	X1	X2
1	Correlations	X3	1.000	-.048	-.756
		X1	-.048	1.000	.069
		X2	-.756	.069	1.000
	Covariances	X3	.026	-.001	-.017
		X1	-.001	.018	.001
		X2	-.017	.001	.019

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	X1	X2	X3
1	1	3.978	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.016	15.864	.00	.48	.10	.03
	3	.004	30.993	.79	.51	.26	.00
	4	.002	40.864	.20	.01	.64	.97

a. Dependent Variable: Y

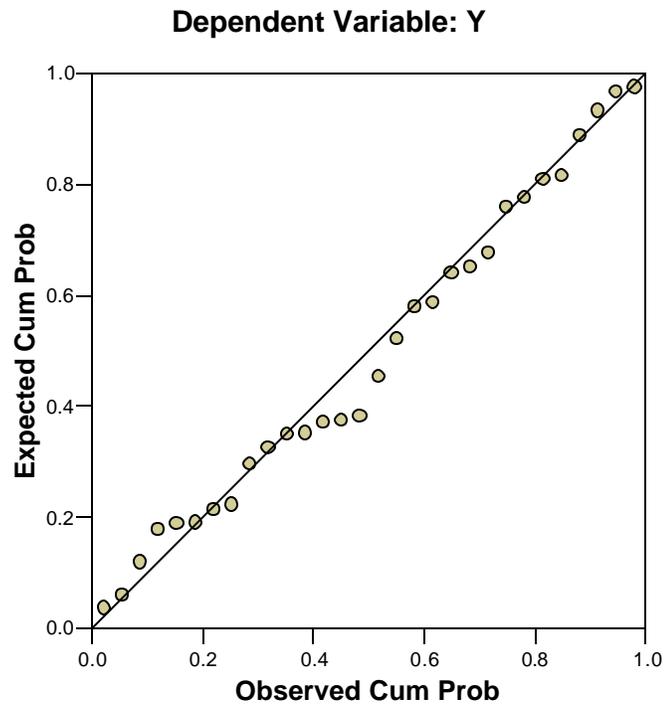
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	51.2424	66.4666	59.8950	3.73514	30
Residual	-5.88667	6.55170	.00000	3.13083	30
Std. Predicted Value	-2.317	1.759	.000	1.000	30
Std. Residual	-1.780	1.981	.000	.947	30

a. Dependent Variable: Y

Charts

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Lampiran 7. Koefisien Taksiran Kontribusi Organisasi, Sumberdaya, serta Aturan dan prosedur kerja (x) Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian (Y)

Variabel (X)	Koefisien Taksiran β	t	Signifikansi
Organisasi (x1)	0,126	0,942	0,355
Sumberdaya (x2)	- 0,109	0,796	0,433
Aturan dan Prosedur kerja (x3)	0,727	4,497	0,000
Constant	16,833	1,994	0,057
Koefisien Determinasi (R^2)	0,587		
R	0,776		